

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Dataran Tinggi Dieng, yang secara administratif berada di kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan Dieng dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang memiliki daya tarik tinggi, namun mempunyai permasalahan lingkungan yang cukup kompleks. Kondisi geografis Dieng yang berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, adanya peningkatan aktivitas wisata, serta pemanfaatan sumber daya alam yang belum berkelanjutan.

Kabupaten Wonosobo mencatat dari 2 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2024, termasuk lonjakan pada libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 57.949 kunjungan (Kedu.suaramerdeka.com, 2025) dan hal inilah yang menjadikan kawasan Dieng mengalami banyak tekanan akibat volume wisatawan yang tinggi. Wonosobo menghadapi produksi sampah yang cukup tinggi, yaitu sekitar 120 ton per-hari, dengan TPA Wonorejo yang sudah melebihi kapasitas ideal dan tumpukan sampah sudah tercatat mencapai 50 meter, jauh diatas batas aman yaitu 30 meter (Radarmagelang.jawapos.com, 2024).

Sebagai lokasi penelitian, kawasan Dieng memiliki karakteristik penting yang sejalan dengan tujuan penelitian ini. Pertama, tantangan dan hambatan komunitas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan terlihat dari masih tingginya volume sampah pariwisata, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat maupun wisatawan terhadap perilaku ramah lingkungan. Kedua, kawasan ini juga menjadi ruang interaksi antara komunitas lokal, pemerintah daerah, pelaku wisata, serta organisasi masyarakat sipil, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dari pemangku kebijakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan program komunitas.

Selain itu, keberadaan Komunitas Dieng Bersih di tengah masyarakat menjadi aktor utama yang menginisiasi berbagai kampanye lingkungan, seperti edukasi masyarakat, gerakan bersih sampah, dan penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan lingkungan. Hal ini menjadikan Dieng sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji strategi kampanye lingkungan melalui analisis SWOT, karena interaksi sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan ini memperlihatkan dinamika nyata antara upaya komunitas, dukungan pemangku kebijakan, serta tantangan struktural yang ada.

Dengan demikian, gambaran umum lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan Dieng tidak hanya penting secara geografis dan wisata, tetapi juga merepresentasikan ruang sosial-ekologis yang relevan untuk mengkaji peran komunitas Dieng bersih dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kampanye lingkungan.

4.1.2. Profil Komunitas Dieng Bersih



Gambar 2. Logo Komunitas Dieng Bersih
Sumber: Dieng Bersih (2025)

Dieng Bersih merupakan sebuah organisasi sosial yang bergerak di bidang lingkungan, dengan fokus utama pada perubahan pola perilaku menuju kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Berdiri sejak tahun 2018, komunitas ini tumbuh dari keprihatinan atas kondisi lingkungan di kawasan Dataran Tinggi Dieng yang mulai terancam oleh meningkatnya volume sampah, terutama akibat kunjungan wisatawan yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran lingkungan. Kehadirannya menjadi sebuah respon kritis terhadap masalah tersebut, dengan mengusung semangat bahwa perubahan harus dimulai dari tingkat individu, komunitas, hingga lintas sektor.

Sejak awal berdirinya, Dieng Bersih berkomitmen membangun jejaring dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik individu, komunitas lokal, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah. Fokus kegiatan diarahkan pada pemberian edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta menginisiasi aksi nyata yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Edukasi yang dilakukan meliputi penyuluhan di sekolah-sekolah, pelatihan di perpustakaan desa, dan kegiatan literasi lingkungan lainnya yang bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini.

Selain edukasi, Dieng Bersih juga aktif melakukan kegiatan praktis yang mendukung pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah menginisiasi atau menghidupkan kembali bank sampah di tingkat desa, mengadakan aksi bersih-bersih lingkungan secara rutin, dan mendorong penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, Dieng Bersih berupaya tidak hanya menyelesaikan masalah sampah secara langsung, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat yang pro-lingkungan secara berkelanjutan.

Dieng Bersih menyadari bahwa tantangan dalam mengelola lingkungan, khususnya sampah di kawasan wisata seperti Dieng, tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci dalam setiap program yang dijalankan. Dukungan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, pegiat wisata, dan relawan menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga konsistensi gerakan ini. Visi yang diusung oleh Dieng Bersih adalah “Menjadikan kawasan Dieng dan sekitarnya yang lebih berkelanjutan.” Visi ini diwujudkan melalui program-program yang terintegrasi antara edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan aksi lapangan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan kearifan lokal, potensi wilayah, serta keterlibatan aktif warga.

Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana, Dieng Bersih tetap konsisten menjalankan perannya sebagai penggerak perubahan positif. Harapan besar yang ingin dicapai adalah menjadikan Dataran Tinggi Dieng dan wilayah sekitarnya sebagai kawasan yang tidak hanya indah secara alamiah, tetapi juga bersih, sehat, dan dikelola secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang.

Melalui gabungan antara aksi nyata di lapangan dan pendekatan edukatif yang terus-menerus, Dieng Bersih ingin memastikan bahwa kesadaran lingkungan menjadi bagian dari budaya masyarakat Dieng. Dengan demikian, pembangunan di wilayah ini dapat berlangsung secara seimbang antara pemanfaatan potensi wisata dan pelestarian lingkungan hidup (Profil Dieng Bersih, 2025).

Logo Komunitas Dieng Bersih dirancang tidak hanya sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai representasi dari nilai dan tujuan yang mereka junjung. Setiap elemen dalam logo tersebut memiliki makna, diantaranya:



Gambar 3. Makna Filosofis Logo Dieng Bersih
Sumber: profil Komunitas Dieng Bersih (2025)

Dalam menjalankan perannya sebagai komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, Dieng Bersih memiliki arah dan landasan yang jelas dalam setiap langkahnya. Arah tersebut tertuang dalam visi dan misi yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota dalam merancang serta melaksanakan berbagai program. Visi dan misi ini tidak hanya menggambarkan cita-cita jangka panjang komunitas, tetapi juga merefleksikan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya, mendorong kesadaran masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip

pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatannya. Untuk memahami arah gerak dan prioritas program yang dijalankan, berikut visi dan misi komunitas Dieng Bersih sebagai acuan utama dalam setiap kegiatan:

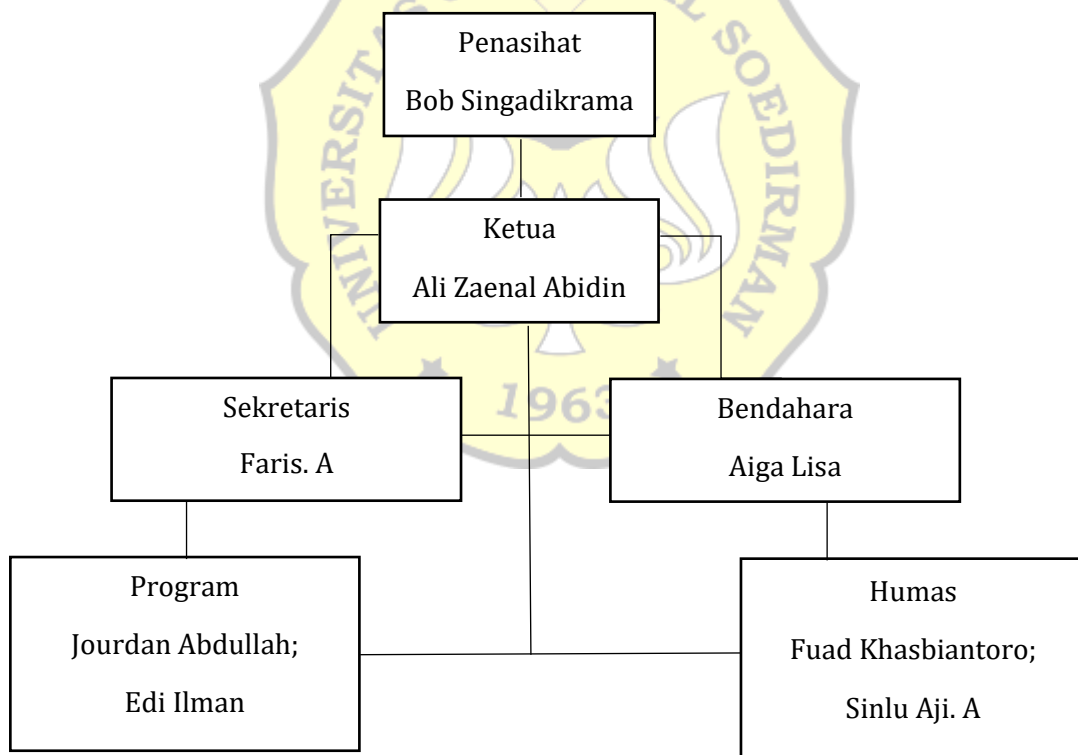
Visi:

Berusaha Menjadikan Kawasan Dieng dan Sekitarnya yang Lebih Berkelanjutan

Misi:

1. Menyadarkan pentingnya kehidupan yang berkelanjutan (penyadaran)
2. Mengurangi dampak yang timbul akibat sampah (Aksi nyata)
3. Menyelaraskan antara perekonomian dan lingkungan (Keberkelanjutan)

Untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap unsur dalam Komunitas Dieng Bersih memiliki peran tertentu. Berdasarkan keterangan dari pihak internal, susunan struktur organisasi komunitas ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2. Struktur Organisasi Komunitas Dieng Bersih

Sumber: Dieng Bersih (2025)

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap anggota Komunitas Dieng Bersih dapat menjalankan perannya secara terarah dan saling melengkapi dalam

mencapai tujuan bersama. Pembagian tugas ini menjadi pondasi bagi terlaksananya berbagai program dan gerakan yang mereka inisiasi. Salah satu wujud nyata dari semangat kolaborasi tersebut adalah kampanye lingkungan yang diwujudkan melalui berbagai gerakan kreatif, termasuk penggunaan tagar atau *hashtag* di media sosial. Tagar ini berfungsi sebagai identitas gerakan sekaligus sarana untuk memperluas jangkauan pesan lingkungan yang diusung oleh komunitas, sehingga mampu menginspirasi dan mengajak lebih banyak pihak untuk berpartisipasi.

Gerakan #MenujuDiengBersih Adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Dieng Bersih sebagai pemicu untuk tetap menjaga kebersihan, kenyamanan bersama terkait lingkungan.



Gambar 4. Tim Dieng Bersih
Sumber: Dokumentasi peneliti (2025)

Dengan aksi nyata terhadap kepedulian lingkungan serta menyebarluaskan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial maupun mainstream diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat luas terkait isu lingkungan.

#menujudiengbersih menargetkan partisipasi anak muda sebagai agen perubahan paradigma masyarakat tentang keberlanjutan (Profil Dieng Bersih, 2025).

4.1.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima informan melalui teknik *purposive* sampling, informan yang dipilih dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan isu lingkungan khususnya dalam kegiatan Dieng Bersih maupun instansi terkait. Kelima informan tersebut terdiri dari ketua komunitas Dieng Bersih, anggota aktif, relawan, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.

Informan pertama merupakan penggerak awal terbentuknya komunitas Dieng Bersih, yang memiliki peran penting dalam merancang visi, misi, serta arah gerakan komunitas. Informan kedua merupakan anggota aktif komunitas yang terlibat langsung dalam kegiatan rutin seperti kampanye lingkungan, pengelolaan sampah, dan sosialisasi kepada masyarakat, informan ketiga dan keempat adalah relawan yang berpartisipasi mengikuti setiap kegiatan yang diadakan komunitas Dieng Bersih sehingga pandangannya merepresentasikan pengalaman di lapangan. Sementara itu, informan kelima berasal dari Dinas Lingkungan Hidup yang berperan memberikan perspektif dari sisi pemerintah mengenai tantangan dan kolaborasi dengan komunitas.

Keterlibatan beragam informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi komunitas Dieng Bersih, baik dari segi internal komunitas, dukungan masyarakat, maupun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

1. Informan 1

Ali Zaenal Abidin (29) adalah koordinator sekaligus penggerak awal *rebranding* komunitas Dieng Bersih sejak 2022. Dengan latar belakang S1 Teknik industri ia sudah aktif di berbagai komunitas lingkungan sejak 2016–2017, seperti *Earth Hour*, *World Cleanup Day*, dan *Ecodefender* ketika masih kuliah di Yogyakarta dan pengalaman memimpin komunitas, ia berperan dalam menyusun strategi serta menggerakkan berbagai kegiatan lingkungan serta berperan menentukan arah gerak komunitas, mulai dari perencanaan program, perorganisasian anggota, hingga menjalin komunikasi dengan berbagai pihak eksternal. Selain itu, ia juga kerap menjadi narasumber dalam forum terkait isu lingkungan, sehingga relevan dijadikan informan penelitian.

2. Informan 2

Jourdan Abdullah (29) laki-laki yang berprofesi sebagai wiraswasta ini merupakan lulusan S1 Hukum Keluarga dan juga sebagai anggota aktif komunitas Dieng Bersih. Keterlibatannya dalam penulisan buku yang berjudul *Dieng, sebelum matahari terbit* dan membahas tentang masalah sampah di Dieng mendorongnya untuk ikut menghidupkan kembali komunitas Dieng Bersih. Dalam komunitas, ia berperan dalam aspek teknis, khususnya mengatur jalannya kegiatan di lapangan. Jourdan terlibat langsung dalam aksi pengelolaan sampah, kampanye lingkungan, dan koordinasi relawan, sehingga perannya penting dalam memastikan program komunitas berjalan efektif, sehingga relevan dijadikan informan penelitian.

3. Informan 3

Achmad Aristyan (30) adalah seorang fotografer asal Wonosobo dan lulusan S1 Agroteknologi. Keterlibatannya dengan Komunitas Dieng Bersih bermula pada tahun 2018, saat dirinya mendaftar sebagai relawan dalam kegiatan pengelolaan sampah pada gelaran Dieng Culture Festival (DCF). Awalnya, ia mengikuti kegiatan tersebut karena diajak oleh seorang teman dan belum memiliki ikatan emosional yang kuat dengan isu lingkungan. Namun, pengalaman pertamanya dalam kegiatan *clean up* membuat Aristyan merasakan dampak nyata dari aksi kolektif menjaga kebersihan kawasan wisata. Melihat venue DCF tetap bersih setelah acara selesai menjadi titik balik yang menumbuhkan motivasinya untuk terus terlibat dalam agenda-agenda Dieng Bersih berikutnya.

4. Informan 4

Febri Dwi Riyadi (27) adalah relawan komunitas Dieng Bersih yang berdomisili Wonosobo dengan latar belakang pendidikan S1 Akuntansi. Ia punya latar belakang sebagai pecinta alam sejak SMA (Sispala) dan kuliah, serta pernah bergabung dengan komunitas *Trashbag Community* yang fokus pada isu sampah di gunung, sebelum akhirnya menemukan wadah yang lebih sesuai di Dieng Bersih.

5. Informan 5

Endang Lisdiyaningsih (52) merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat

pemerintah daerah, beliau memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, regulasi, serta pendampingan bagi komunitas maupun kelompok aktivis lingkungan di Wonosobo. Sebagai perwakilan dari instansi pemerintah, beliau memiliki peran penting dalam mendukung, mengarahkan, dan menjalin kerja sama dengan Komunitas Dieng Bersih. Kehadirannya sebagai informan memberikan perspektif dari sisi kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait strategi pengelolaan lingkungan, kolaborasi dengan komunitas masyarakat, serta langkah-langkah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 3 Ringkasan Informan Penelitian

| Identitas (Nama, pekerjaan, usia) | Peran dalam komunitas/Instansi | Keterangan khusus |
|---|---|---|
| Ali – 29 Tahun, Wiraswasta | Penggerak awal dan ketua komunitas Dieng Bersih | Aktif dalam proses <i>rebranding</i> komunitas sejak 2022 |
| Jourdan – 29 Tahun, Wiraswasta | Anggota aktif, dalam divisi teknis dan humas | Berperan mengatur jalannya kegiatan lapangan, serta menjadi komunikasi eksternal, dan terlibat dalam proyek optimalisasi TPST Dieng kulon |
| Aristyan – 30 Tahun, Fotografer | Relawan | Aktif sejak awal berdirinya komunitas Dieng Bersih di gelaran <i>Dieng Culture Festival</i> |
| Febri – 27 Tahun, Wiraswasta | Relawan | Aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah dan aksi sosial komunitas |
| Endang – 52 Tahun, Kepala DLH Kab. Wonosobo | Perwakilan Instansi Pemerintah | Memberikan perspektif kebijakan dan sinergi antara pemerintah dengan komunitas |

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

4.1.4. Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan tahap penentuan tema yang dilakukan pada awal Agustus 2024. Pada tahap ini, peneliti melakukan eksplorasi literatur, observasi awal lapangan, serta diskusi intensif dengan dosen pembimbing untuk mengidentifikasi topik yang relevan, aktual, dan memiliki kontribusi akademis maupun praktis. Setelah mempertimbangkan urgensi isu lingkungan, peran komunitas, serta masukan dari dosen pembimbing, maka dipilihlah tema penelitian dengan judul *"Tantangan Komunitas Dieng Bersih dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Kampanye Lingkungan"*. Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya peran komunitas lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui gerakan kampanye lingkungan.

Penelitian ini melalui serangkaian tahapan yang dilakukan secara bertahap hingga menghasilkan data yang dianalisis. Proses awal bermula dari ketertarikan peneliti terhadap keindahan yang dimiliki wilayah Dieng, serta persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan bimbingan akademik, peneliti memutuskan untuk meneliti aktivitas dan dinamika komunitas Dieng Bersih sebagai salah satu komunitas yang konsisten mengkampanyekan kebersihan lingkungan melalui aksi nyata dan kampanye publik.

Tahap awal dilakukan dengan observasi pendahuluan, di mana peneliti mengamati kegiatan komunitas Dieng Bersih melalui media sosial serta media daring lainnya mengenai kondisi pengelolaan sampah di Wonosobo. Dari hasil pengamatan tersebut, ditemukan fakta bahwa sekitar 40% sungai di Wonosobo tercemar serta status TPA Wonorejo yang mengalami *overload* sejak 2022 (magelangspreksdisway, 2019). Fakta tersebut menguatkan urgensi penelitian dan peran penting komunitas dalam mengisi celah yang belum teratasi oleh kebijakan pemerintah.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Wonosobo sejak tanggal 19 Juli hingga 23 Juli 2025 melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Setelah tahap pengumpulan data selesai, peneliti memasuki tahap analisis data serta penulisan hasil dan pembahasan penelitian. Proses ini berlangsung sejak 6 Agustus hingga 9 September 2025.

Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari penentuan tema, penyusunan dan seminar proposal,

revisi serta persetujuan, hingga observasi, pengumpulan data, dan analisis. Rangkaian proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, mendalam, serta memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap kajian pembangunan berkelanjutan.

4.1.5. Tantangan Komunitas Dieng Bersih

Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi komunitas Dieng Bersih dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kampanye lingkungan, Komunitas Dieng Bersih menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Kompleksitas semakin meningkat seiring dengan tingginya tekanan lingkungan di kawasan Dieng, sehingga strategi kampanye tidak hanya menekankan aspek kebersihan, tetapi juga membangun kesadaran bersama antara masyarakat dan wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan lima narasumber, teridentifikasi faktor-faktor penghambat yang berasal dari aspek internal maupun eksternal komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komunitas, anggota aktif, relawan serta pemangku kebijakan, tantangan yang dihadapi komunitas Dieng Bersih dapat dikategorikan menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal:

1. Tantangan Internal

a. Regenerasi Anggota dan Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM)

Tantangan utama yang dirasakan dari dalam komunitas adalah masalah regenerasi anggota dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ali sebagai informan 1 sekaligus ketua komunitas Dieng bersih menyampaikan bahwa berbeda dengan kota besar yang memiliki generasi muda yang dapat diberdayakan, di daerah seperti Wonosobo minat generasi muda untuk bergabung dalam komunitas non-profit relatif rendah. Sebagian besar pemuda cenderung lebih fokus pada kegiatan yang bersifat *profit-oriented*, sehingga menimbulkan hambatan dalam proses kaderisasi. Hal ini juga berdampak pada konsistensi program, apalagi mengingat sebagian besar anggota memiliki kesibukan pribadi yang membuat sulit untuk mengatur waktu kegiatan bersama.

“...tapi kalau di daerah tuh agak susah. karena kebanyakan langsung mengacunya ke *profit oriented*. Jadi itu agak susah juga. Jadi komunitas yang basicnya non-profit, itu jarang lah diminati, jarang banget. kalau kita bandingkan sama kota besar, masih banyak anak-anak muda yang ya mereka masih banyak cari pengalaman. Jadi regenerasinya bakalan lebih cepet dan lebih enak. Kalau di daerah ini agak susah” (Wawancara, 2025).

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa saat ini komunitas Dieng Bersih memiliki 8 anggota yang tercatat secara struktural, sementara di luar kepengurusan formal terdapat sejumlah relawan aktif yang secara konsisten terlibat dalam berbagai kegiatan seperti edukasi lingkungan, *clean-up*, dan kampanye publik. Relawan ini memang tidak terikat dalam struktur organisasi, tetapi keberadaan mereka memperlihatkan bahwa minat untuk berpartisipasi sebenarnya ada. Hanya saja, sebagian besar calon anggota yang awalnya menunjukkan ketertarikan seringkali mengurungkan niat ketika mengetahui bahwa komunitas Dieng Bersih berbasis non-profit dan tidak menjanjikan keuntungan finansial. Fenomena ini menunjukkan adanya peran ganda, di satu sisi regenerasi struktural berjalan lambat karena adanya keterbatasan pemuda yang bersedia berkomitmen secara formal, namun di sisi lain partisipasi relawan tetap terjaga dan menjadi penunjang utama kegiatan komunitas Dieng Bersih

Kendala regenerasi sejalan dengan yang ditemukan dalam penelitian Akmaluddin, *et al* (2025) mengenai komunitas sahabat hijau di kota Banda Aceh, yang menyoroti masalah jumlah relawan yang aktif sedikit sehingga tidak sepadan dengan kegiatan komunitas, hal inilah yang menjadi hambatan utama dalam menjalankan program *Less waste event* (LWE) yang dimiliki oleh kelompok Sahabat Hijau. Kondisi serupa menegaskan bahwa masalah serupa dialami juga oleh komunitas lingkungan lainnya di Indonesia khususnya di daerah yang kekurangan SDM aktif apalagi dalam isu lingkungan.

Salah satu isu utama dari dimensi sosial ialah lemahnya regenerasi anggota, fenomena ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan kesinambungan antargenerasi,

yakni bagaimana kebutuhan generasi kini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Famiola, *et al.*, 2024). Lemahnya regenerasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan partisipasi lintas generasi, dimana masih kurangnya kesadaran generasi muda dalam melanjutkan peran dan kontribusi yang telah dibangun. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kesinambungan gerakan sosial, tetapi juga berimplikasi pada terlambatnya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Fenomena lemahnya regenerasi anggota dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari kerentanan sosial yang berpotensi melemahkan daya tahan komunitas dalam jangka panjang (Fernando, *et al.*, 2024).

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Amirya, *et al* (2023) bahwa implementasi SDGs di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius dalam dimensi sosial, khususnya kesenjangan, keterbatasan akses layanan sosial, lemahnya pemberdayaan, serta adanya urgensi kesinambungan antargenerasi sebagai syarat keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, lemahnya generasi anggota komunitas dapat diposisikan sebagai representasi mikro dari persoalan sosial yang lebih luas dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, sekaligus hal ini mempertegas bahwa dimensi sosial menjadi aspek yang rentan dalam menentukan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

b. Legalitas dan Identitas Komunitas

Dieng Bersih belum memiliki status hukum yang jelas, seperti SK (surat keputusan) komunitas dari pemerintah daerah. Hal ini yang membuat adanya beberapa kendala yang dihadapi, termasuk sulitnya mengakses dukungan dana, terbatasnya ruang gerak dalam menjalin kemitraan resmi, hingga adanya klaim nama dari pihak lain. Ali menjelaskan saat itu ada mahasiswa KKN dari salah satu universitas di Jawa Tengah yang berusaha melegalkan nama “Dieng bersih” tanpa koordinasi, sehingga sempat menimbulkan konflik identitas komunitas. Belum adanya legalitas secara formal menempatkan komunitas dalam posisi rentan, baik dari segi legitimasi kelembagaan maupun

akses dukungan. Hal ini menimbulkan konflik identitas, bahkan sampai menimbulkan kebingungan karena ada kelompok lain yang juga menggunakan nama serupa. Situasi ini menunjukkan bahwa ketiadaan legalitas membuat komunitas berada dalam posisi rawan, baik secara kelembagaan maupun dalam membangun kredibilitas di hadapan mitra.

Berdasarkan observasi lapangan, komunitas Dieng Bersih tetap dapat melaksanakan program rutin seperti edukasi lingkungan, *clean-up*, hingga kampanye di sekolah. Bahkan, dalam beberapa momentum komunitas masih bisa menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Fakta ini memperlihatkan bahwa legalitas sosial komunitas lebih banyak bertumpu pada adanya kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat, ketimbang status hukum formal.

Namun demikian, pengalaman di lapangan juga memperlihatkan bahwa persoalan legalitas akan menjadi permasalahan di masa depan. Misalnya, saat muncul konflik klaim nama oleh kelompok lain atau ketika pihak swasta mensyaratkan dokumen kelembagaan resmi untuk kerjasama jangka panjang. Situasi ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini legalitas bukanlah tantangan yang kompleks, namun akan menjadi faktor risiko struktural yang berpotensi membatasi ruang gerak komunitas di kemudian hari.

Permasalahan legalitas ini juga divalidasi oleh Jourdan Abdullah, anggota aktif komunitas, yang menjelaskan bahwa pengakuan resmi dari pemerintah daerah baru muncul setelah adanya pendekatan khusus dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia menyebutkan sempat terjadi perebutan nama antara kelompok di Dieng Wetan dan komunitas yang sudah lebih dahulu eksis. Untuk menghindari konflik berkepanjangan, komunitas akhirnya meminta pengakuan resmi dari DLH sebagai bentuk legitimasi.

“...warga Dieng Wetan juga bikin *Dieng Bersih* sendiri. Mereka memang tujuannya untuk mengajukan proposal. Jadi ya karena kebetulan sama itu jadi ada problem karena masyarakat Dieng Wetan sudah punya legalitas. Akhirnya kita melakukan

pendekatan ke DLH agar mengakui secara *De Jure* untuk *Dieng Bersih* yang sudah ada terlebih dahulu. Karena sudah memiliki track record jadi diresmikan juga. Tapi ya itu yang bikin cukup capek” (Wawancara, 2025).

Padahal, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya tata kelola yang transparan, kebertanggungjawaban, dan berlandaskan kelembagaan yang kuat, hal ini sesuai dengan poin 16 dan 17 pada tujuan pembangunan berkelanjutan, poin 16 yakni *peace, justice, and strong institutions* (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh), dan poin 17 *partner ship for the goals* (kemitraan untuk mencapai tujuan). Situasi ini membuat komunitas Dieng Bersih belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang kolaborasi dengan pemerintah maupun lembaga lain, sehingga keberlanjutan finansialnya sangat bergantung pada dukungan swasta atau iuran anggota. Dengan demikian, tantangan legalitas dan identitas bukan sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut legitimasi, konsolidasi internal, serta keberlanjutan program komunitas. hal ini perlu segera ditangani agar komunitas Dieng Bersih mampu memperkuat peran strategisnya dalam kampanye lingkungan di kawasan Dieng.

c. Keterbatasan dalam pengelolaan kerja sama

Tantangan lain yang di hadapi komunitas Dieng Bersih adalah keterbatasan dalam mengelola kerja sama dengan *stakeholder*. Ali Zaenal Abidin selaku ketua komunitas Dieng Bersih menegaskan bahwa meskipun kolaborasi dengan pihak swasta seperti perusahaan atau sekolah dapat berjalan, namun prosesnya tidak selalu berkelanjutan. Bentuk kontribusi dari mitra sering kali berupa dukungan kas atau fasilitas, tetapi sifatnya masih insidental dan belum menjadi kemitraan strategis yang konsisten. Ali menyebut:

“Kalau swasta kolaborasi jatuhnya... ya biasanya mereka profit, aku wajibin buat ngasih sesuatu, kas ke Dieng Bersih minimal. Beda sama pemerintah yang lebih ke regulator” (Wawancara, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama masih bersifat pragmatis dan bergantung pada konteks kepentingan jangka pendek

masing-masing pihak. Sejalan dengan itu Jourdan Abdullah menambahkan bahwa keterbatasan komunikasi dan manajemen internal sering berdampak pada keberlanjutan kerja sama. Jourdan menjelaskan bahwa tidak semua tawaran kolaborasi bisa diakomodasi karena adanya keterbatasan tenaga, kesibukan anggota, hingga kurangnya tindak lanjut.

“Ada beberapa kolaborasi yang akhirnya gagal. Faktornya dari sana ataupun dari kita yang tidak follow up. Kita sering tidak follow up atau bahkan kita yang digantungkan” (Wawancara, 2025).

Berdasarkan hasil observasi, pola kerjasama yang dijalin komunitas Dieng Bersih dengan *stakeholder* memang masih bersifat insidental dan belum terstruktur. Dalam beberapa kegiatan kampanye lingkungan seperti *clean-up* atau edukasi sekolah, dukungan dari *stakeholder* berupa dana kas. Pola serupa juga terlihat dalam kolaborasi dengan sekolah-sekolah sekitar, di mana kegiatan berhenti pada satu kali penyuluhan tanpa agenda yang berkelanjutan. Bentuk kerjasama insidental ini juga tampak pada kegiatan bersama pihak swasta, seperti kolaborasi dengan Horison Resort dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan peringatan HUT ke-22 PT Metropolitan Golden Management yang diisi dengan kegiatan *clean-up* di kawasan Gunung Bismo. Selain itu, komunitas juga kerap terlihat dalam acara yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo seperti, acara memperingati Hari Peduli Sampah Nasional.

Meskipun demikian, terlihat pula bahwa komunitas Dieng Bersih tetap berusaha menjaga hubungan dengan *stakeholder* kunci, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo. Bentuk kemitraan dengan DLH memang lebih bersifat regulatif, namun keberadaan lembaga ini membantu menguatkan pengakuan komunitas Dieng Bersih. Sementara dengan swasta, sifat hubungan masih pragmatis, tetapi tetap memberi kontribusi nyata dalam mendukung beberapa kegiatan lapangan.

Dengan demikian, observasi ini memperkuat pernyataan informan bahwa keterbatasan pengelolaan kerja sama bukan hanya soal kurangnya mitra, melainkan juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme tindak lanjut dan manajemen internal. Jika tidak segera diperkuat, potensi kolaborasi strategis yang mendukung keberlanjutan program dapat terbuang percuma.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kelemahan dalam aspek manajemen kemitraan menyebabkan hilangnya peluang strategis bagi komunitas untuk memperluas jaringan maupun meningkatkan kapasitas program lingkungan. Temuan lapangan ini selaras dengan Astuti, et al (2024) yang menjelaskan bahwa organisasi berbasis masyarakat (OBM) sangat bergantung pada kolaborasi lintas pemangku kebijakan, baik pemerintah swasta, maupun masyarakat guna memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan dampak program. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa kolaborasi yang tidak terstruktur serta dukungan kelembagaan yang lemah dapat mengurangi efektivitas organisasi dan menghambat keberlanjutan program jangka panjang. Demikian pula, Demmanggasa (2024), menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola kolaborasi sering disebabkan oleh lemahnya kapasitas organisasi dalam merancang kesempatan formal, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, keterbatasan pengelolaan kerja sama bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga berimplikasi pada keberlanjutan gerakan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kerja sama lintas aktor menjadi elemen kunci untuk memperkuat partisipasi masyarakat, mengintegrasikan dukungan sumber daya, serta membangun validitas gerakan. Apabila tantangan ini tidak diatasi, maka posisi Komunitas Dieng Bersih sebagai motor penggerak kampanye lingkungan di kawasan Dieng berpotensi melemah dalam jangka panjang.

2. Tantangan Eksternal

a. Faktor Geografis dan Insfrastruktur

Salah satu tantangan eksternal yang signifikan dihadapi komunitas Dieng Bersih adalah kondisi geografi dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Lokasi Dieng yang berupa dataran tinggi yang berbukit-bukit membuat akses ke desa-desa dan pengelolaan sampah menjadi terhambat, terutama untuk menjangkau titik-titik yang jauh dari pusat kegiatan. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana, karena kurangnya insfrastruktur pengelolaan sampah juga memperburuk keadaan, misalnya ada TPS/TPA per-desa yang masih dikelola secara asal, sehingga berpotensi menjadi pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan, penurunan kualitas hidup, hingga kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hal ini ditegaskan oleh Ali Zaenal Abidin, ketua komunitas Dieng Bersih, yang menjelaskan bahwa:

“Di Dieng ini problemnya bukan hanya sampahnya yang banyak, tapi juga tempat buangnya yang nggak jelas. TPS tiap desa ada, tapi dikelola asal, nggak ada standar, akhirnya sampah menumpuk dan nyebar ke sungai. Aksesnya juga susah, jalannya naik turun, mobil pengangkut sering nggak bisa masuk” (Wawancara, 2025).

Kondisi ini menempatkan komunitas pada posisi sulit, karena upaya kampanye lingkungan sering kali terkendala oleh minimnya dukungan infrastruktur dasar. Dengan keterbatasan sarana prasarana, kerja-kerja komunitas lebih banyak difokuskan pada kegiatan manual seperti pembersihan, edukasi, dan kampanye, tanpa bisa menjangkau persoalan struktural berupa penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa kondisi geografis Dieng yang berupa dataran tinggi berbukit dengan akses jalan sempit memang menyulitkan proses pengelolaan sampah. Pada beberapa titik desa, jalan menanjak dan berkelok membuat kendaraan pengangkut sampah tidak dapat masuk, bahkan di beberapa

lokasi, terlihat tumpukan sampah di tepi jalan atau di pinggir sungai karena tidak adanya fasilitas yang memadai untuk penampungan. Hal ini memperkuat keterangan informan bahwa sistem pengelolaan sampah di tingkat desa masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar.

Selain itu, observasi juga menemukan bahwa kegiatan komunitas sering kali lebih fokus pada aksi seperti *clean-up* atau edukasi ke sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan sarana teknis yang bisa menunjang pengelolaan sampah jangka panjang seperti, pada kegiatan bersih sampah, relawan masih menggunakan karung dan gerobak sederhana untuk mengangkut sampah, sementara akses jalan untuk mobil pengangkut tidak dapat digunakan. Situasi ini menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak hanya berdampak pada teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menambah beban kerja relawan.

Dari sisi sosial, kondisi geografis yang sulit juga membuat distribusi informasi dan koordinasi dengan warga desa lebih menantang. Dalam beberapa kasus, kampanye lingkungan tidak menjangkau desa-desa yang akses jalannya lebih jauh dari pusat kegiatan komunitas, sehingga pesan kampanye tidak merata. Observasi ini menunjukkan bahwa persoalan geografis dan keterbatasan infrastruktur bukan sekedar hambatan teknis, tetapi juga memengaruhi jangkauan kampanye, efektivitas program, serta beban relawan dalam menjalankan kegiatan. Dengan kata lain, tanpa dukungan perbaikan infrastruktur, komunitas akan terus terjebak pada solusi jangka pendek yang tidak mampu menjawab akar masalah pengelolaan sampah di kawasan Dieng.

Situasi ini konsisten dengan penelitian Nur, *et al* (2023) yang menegaskan bahwa wilayah dengan akses geografis terbatas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang minim cenderung mengalami permasalahan lingkungan yang lebih kompleks. Tanpa adanya dukungan kelembagaan dan investasi infrastruktur, upaya komunitas

berbasis masyarakat akan terjebak pada solusi jangka pendek yang tidak mampu mengatasi akar masalah.

Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah menegaskan dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Penelitian Lingga, *et al* (2024) menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan dari lingkungan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Temuan ini dapat diposisikan sejalan dengan permasalahan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang mempertegas kerentanan dimensi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam menghadapi kendala akses dan distribusi layanan pengelolaan sampah, terutama di wilayah perdesaan, terpencil, atau daerah dengan topografi sulit. Dalam konteks ini, keterbatasan infrastruktur tidak hanya soal minimnya fasilitas teknis seperti TPS dan TPA, tetapi juga berhubungan erat dengan hambatan geografis yang menyebabkan layanan persampahan tidak merata. Oleh karena itu, penelitian Lingga *et al.* memberikan validasi akademik bahwa tantangan pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor geografis dan infrastruktur, yang pada akhirnya memperkuat pentingnya dimensi lingkungan sebagai komponen krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan masih jauhnya capaian SDGs poin 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan serta poin SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Apabila infrastruktur tidak memadai, maka kampanye lingkungan yang dilakukan komunitas akan sulit memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, faktor geografis dan infrastruktur menjadi tantangan eksternal yang menghambat efektivitas gerakan lingkungan di kawasan Dieng. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunitas dalam mengubah perilaku masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dukungan sistemik berupa aksesibilitas wilayah dan

ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Tanpa adanya perbaikan dari sisi struktural ini, maka program kerja komunitas seperti Dieng Bersih akan terus menghadapi keterbatasan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

b. Perbedaan Orientasi dengan Pemangku Kebijakan

Tantangan eksternal lain yang dihadapi komunitas Dieng Bersih adalah adanya perbedaan orientasi dengan pemangku kebijakan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah umumnya menempatkan diri dalam posisi sebagai regulator dengan orientasi pada aspek formal, administratif, dan seremonial, sedangkan komunitas bergerak lebih fleksibel melalui aksi nyata yang bersifat partisipatif dan kreatif. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kesenjangan dalam kerja sama, di mana pemerintah cenderung fokus pada regulasi dan penyusunan program formal, sementara komunitas lebih menekankan pada aksi lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Endang Lisdiyaningsih, kepala DLH Wonosobo, yang menyatakan bahwa peran dinas lebih banyak sebagai pengawal regulasi dan fasilitator, sementara eksekusi di lapangan diserahkan kepada komunitas, beliau menjelaskan:

“DLH itu kan lebih ke regulasi, aturan, kebijakan. Kalau di lapangan ya komunitas seperti Dieng Bersih yang bergerak. Kita support dari sisi aturan dan kegiatan seremonial, tapi untuk pendanaan memang tidak ada anggaran khusus”

Sementara itu, dari perspektif komunitas, perbedaan orientasi ini kadang menimbulkan kesulitan dalam menjalin kolaborasi jangka panjang. Ali Zaenal Abidin menegaskan bahwa hubungan kerja sama dengan DLH memang ada, tetapi sifatnya lebih teknis dan momentum.

Ali menyebutkan:

“DLH itu ya sebatas fasilitasi, kalau ada acara bareng ya kita dilibatkan. Tapi soal program jangka panjang atau pendanaan, mereka memang tidak masuk. Jadi ya kita jalan sendiri dengan cara kita”

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun ada sinergi, orientasi yang berjalan sangat berbeda dan hal ini menyebabkan kerja sama belum mencapai bentuk yang struktural dan berkelanjutan. Komunitas cenderung lebih dinamis dan inovatif, sementara pemerintah dibatasi oleh birokrasi dan mekanisme administratif yang formal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, terlihat adanya dinamika relasi yang cukup kompleks antara komunitas Dieng Bersih dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo. Secara umum, hubungan keduanya berjalan dengan baik dan saling mendukung, namun orientasi dalam menjalankan program lingkungan menunjukkan arah yang berbeda. Di lapangan, peneliti menemukan bahwa DLH cenderung berfokus pada kegiatan formal dan administratif, seperti penyusunan kebijakan, pengawasan regulasi, serta pelaksanaan kegiatan seremonial tahunan. Keterlibatan DLH lebih banyak terlihat pada momentum-momentum besar seperti peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau Hari Lingkungan Hidup, di mana komunitas khususnya komunitas Dieng Bersih sering dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan (*event organizer*). Dalam konteks ini, kolaborasi bersifat temporer dan berbasis kegiatan tertentu, belum menyentuh kerja sama strategis yang bersifat berkelanjutan.

Sebaliknya, komunitas Dieng Bersih lebih menekankan pada kerja lapangan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Aktivitas komunitas seperti edukasi lingkungan, bersih sungai, dan kampanye pengurangan sampah plastik dilakukan secara mandiri dengan pendekatan partisipatif. Observasi juga menunjukkan bahwa komunitas memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam melibatkan masyarakat, misalnya melalui kegiatan kampanye berbasis seni dan budaya lokal. Namun, pola kerja yang dinamis ini sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme birokrasi pemerintah yang lebih kaku.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara orientasi dan mekanisme kerja antara pemerintah dan komunitas. Dalam hal ini

DLH mengedepankan pendekatan formal sebagai representasi otoritas negara, sementara komunitas lebih menonjolkan gerakan sosial berbasis partisipasi warga. Kesenjangan ini berdampak pada terbatasnya dukungan sumber daya yang diterima komunitas, terutama dalam hal pendanaan dan fasilitasi program jangka panjang.

Namun demikian, observasi juga menemukan bahwa perbedaan orientasi ini tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, keduanya saling melengkapi seperti regulasi dan kebijakan pemerintah memberi legalitas bagi komunitas untuk bergerak, sementara komunitas berperan sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi lapangan. Misalnya, saat pelaksanaan kegiatan *cleanup* dan advokasi pembentukan peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah, DLH memberikan dukungan moral dan regulatif, sementara Komunitas Dieng Bersih melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat desa.

Secara konseptual, fenomena ini menggambarkan proses timbal balik antara struktur dan gerakan non-formal sebagaimana dijelaskan dalam *New Social Movement Theory*. Komunitas berperan sebagai aktor perubahan yang bekerja di luar sistem formal, tetapi tetap membutuhkan dukungan struktural agar gerakannya berkelanjutan (Puspa & Manalu, 2021).

Dengan demikian, hasil observasi menegaskan bahwa tantangan utama dalam hubungan antara Komunitas Dieng Bersih dan DLH bukan pada konflik langsung, melainkan pada perbedaan orientasi dan mekanisme kerja. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan, diperlukan model kolaborasi yang lebih komprehensif, di mana regulasi pemerintah dan inisiatif komunitas dapat saling mendukung secara strategis dan berkesinambungan (Alif, *et al.*, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ferdian, *et al* (2024) yang menekankan pentingnya keselarasan orientasi dalam kolaborasi lintas-pemangku kebijakan. Hal ini ditunjukkan bahwa adanya perbedaan pada orientasi dan lemahnya dukungan kelembagaan akan

mengurangi efektivitas serta keberlanjutan program organisasi berbasis masyarakat. Demikian dengan penelitian, Wardani, *et al* (2025) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan komunitas seringkali tidak optimal karena pemerintah lebih menekankan pada kegiatan seremonial, sedangkan komunitas membutuhkan dukungan nyata berupa fasilitas sumber daya dan keberlanjutan program.

Perbedaan ini menciptakan adanya jarak dalam orientasi, namun juga membuka ruang yang saling melengkapi. Regulasi pemerintah bisa menjadi dasar formal, sedangkan komunitas memberi “Ruh” melalui aksi nyata di lapangan. Namun, bagi komunitas mekanisme birokrasi yang formal menjadi faktor eksternal yang dapat membatasi karena mereka harus menyesuaikan diri dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Perbedaan pada pola kerja ini tampak dalam penyelenggaraan Hari Peduli Sampah Nasional. DLH secara formal memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi justru menunjuk komunitas untuk menjadi penyelenggara acara. Kepala DLH menjelaskan.

“ketika ada hari peduli sampah nasional kita memang menunjuk salah satu organisasi aktivis yang membuat acara penyelenggara dan Dieng Bersih sudah dua kali kita tunjuk pas acara hari peduli sampah nasional kemudian *cleanup*. Hari lingkungan juga pernah Dieng Bersih yang menjadi EO nya” (Wawancara, 2025).

Dari sudut pandang pemerintah, ditunjuknya komunitas Dieng Bersih sebagai EO acara ini adalah sebagai bentuk kolaborasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, dari sisi komunitas, hal ini menunjukkan bahwa ruang gerak komunitas sering kali dibatasi oleh momentum acara formal, bukan dukungan struktural jangka panjang. Perbedaan pola kerja ini juga terlihat dalam advokasi regulasi desa (perdes) terkait pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki otoritas untuk menginstruksikan lahirnya peraturan desa, tetapi DLH menyebut:

“Kami berharap Dieng Bersih membantu kami untuk mengawal terbentuknya komitmen regulasi desa yang ada di kawasan Dieng” (Wawancara, 2025)

Dalam hal ini, komunitas didorong untuk masuk ke ruang formal yang biasanya menjadi ranah pemerintah, meskipun kapasitas mereka lebih kuat pada aksi lapangan dan edukasi. Kondisi ini menegaskan bahwa prosedur kelembagaan seringkali menjadi faktor eksternal yang membatasi komunitas, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan prosedur regulatif yang lebih kaku.

Perbedaan pola kerja ini dapat dimaknai sebagai tantangan, dan juga sebagai peluang untuk saling melengkapi. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah secara kelembagaan, sedangkan inisiatif komunitas menghadirkan energi sosial yang mampu menjangkau ruang-ruang yang sulit tersentuh pemerintah. Dalam kerangka *new social movement theory*, ketegangan antara struktur formal dan gerakan non-formal justru menciptakan dialektika yang memperkaya strategi gerakan. Sementara dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, perbedaan pola kerja ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan memerlukan integrasi antara kebijakan formal dan aktualisasi nyata.

Dengan demikian, perbedaan orientasi antara komunitas Dieng Bersih dan DLH menjadi tantangan eksternal penting yang harus diatasi. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi program kampanye lingkungan. Padahal, dalam latar belakang pembangunan berkelanjutan, sinergi antara regulasi pemerintah dan aksi partisipatif komunitas merupakan menjadi syarat yang fundamental untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif.

c. Kolaborasi yang Bersifat Momentum

Faktor eksternal lain yang cukup dominan dalam relasi antara DLH Kabupaten Wonosobo dan komunitas Dieng Bersih adalah pola kolaborasi yang lebih bersifat momentum ketimbang dukungan struktural jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, DLH

memang menjalin kemitraan dengan komunitas, namun keterlibatan tersebut lebih sering terlihat pada momen-momen seremonial seperti Hari Peduli Sampah Nasional atau Hari Lingkungan Hidup. Kepala DLH bahkan menyatakan.

“ketika ada hari peduli sampah nasional kita memang menunjuk salah satu organisasi aktivis yang membuat acara penyelenggara dan Dieng Bersih sudah dua kali kita tunjuk pas acara hari peduli sampah nasional kemudian *cleanup*. Hari lingkungan juga pernah Dieng Bersih yang menjadi EO nya” (Wawancara, 2025).

Kutipan wawancara tersebut memperlihatkan bahwa posisi komunitas dalam kolaborasi seringkali ditempatkan sebagai pelaksana teknis atau penyelenggara acara resmi. DLH memiliki anggaran kegiatan yang dapat digunakan untuk membuat acara, tetapi lebih memilih mempercayakan teknis pelaksanaan kepada komunitas Dieng Bersih. Di satu sisi, hal ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kapasitas yang dimiliki oleh komunitas Dieng Bersih dan peluang bagi mereka untuk meningkatkan eksistensi di hadapan publik maupun pemangku kepentingan lainnya. Namun, di sisi lainnya, pola kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap komunitas masih terbatas pada kegiatan insidental, bukan pada penguatan kelembagaan jangka panjang.

Bagi komunitas, pola kolaborasi berbasis momentum seperti ini membawa dua implikasi. Pertama, kolaborasi seremonial memberikan ruang publikasi dan jaringan yang lebih luas, sehingga citra Komunitas Dieng Bersih sebagai aktor penting dalam kampanye lingkungan semakin diakui. Hal ini terlihat pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama Horison Resort yang dipublikasikan melalui berbagai *platform* media sosial dan menarik minat relawan baru untuk bergabung. Hal ini dapat memperkuat validitas mereka di mata masyarakat dan mendorong partisipasi relawan baru. Kedua, pola semacam ini juga menimbulkan tantangan eksternal karena keberlanjutan programnya tidak selalu terjamin. Setelah acara

selesai, tidak ada jaminan bahwa dukungan atau keterlibatan pemerintah akan berlanjut hingga pada ranah penguatan struktural.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sakitri, *et al* (2018) mengungkapkan bahwa kegiatan seremonial dapat menjadi sarana bagi komunitas untuk meningkatkan keterlihatan serta memperluas jejaring sosial. Keterlibatan dalam aktivitas publik juga menghadirkan bentuk pengakuan sosial sekaligus kesempatan promosi bagi komunitas. Namun demikian, pola partisipasi tersebut umumnya belum dirancang secara strategis, sehingga kontribusi komunitas dalam jangka panjang cenderung tidak berkelanjutan.

Kepala DLH menegaskan bahwa pola kolaborasi tidak hanya ditujukan untuk satu komunitas tertentu, melainkan harus bisa melibatkan banyak pihak:

“kemudian, yang kita tunjuk itu tidak individu organisasi tapi dia harus bisa merangkul semua teman-teman aktivis yang ada di kabupaten Wonosobo” (Wawancara, 2025).

Artinya, ketika Dieng Bersih dipercaya sebagai penyelenggara acara, mereka juga diharapkan untuk merangkul komunitas lain agar dapat berkolaborasi bersama. Hal ini tentu menjadi sisi yang sangat positif dalam merangkul semua elemen sosial yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tetapi disisi lain membuat posisi komunitas tidak sepenuhnya mendapat dukungan istimewa, melainkan harus berbagi ruang dan sumber daya dengan kelompok lain.

Hasil observasi lapangan menunjukkan hubungan antara komunitas Dieng Bersih dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo berjalan secara baik, namun masih bersifat insidental dan berorientasi pada momen tertentu. Dalam praktiknya, kolaborasi ini memberikan ruang bagi komunitas Dieng Bersih untuk tampil di hadapan publik dan memperluas jaringan sosialnya, tetapi belum berkembang menjadi bentuk kemitraan struktural yang berkelanjutan.

Di lapangan, peneliti mengamati bahwa setiap kali terdapat agenda lingkungan berskala kabupaten, Komunitas Dieng Bersih menjadi pihak yang paling aktif dalam pelaksanaan teknis kegiatan. Namun, setelah momentum kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya tindak lanjut program yang berkelanjutan dari pihak DLH maupun pemerintah daerah. Kolaborasi cenderung berhenti pada kegiatan seremonial, tanpa adanya upaya penguatan kelembagaan seperti pelatihan manajemen organisasi, pendanaan berkelanjutan, atau penyusunan program kerja bersama jangka panjang.

Kondisi ini menimbulkan dinamika ganda bagi komunitas Dieng Bersih. Di satu sisi, momentum kegiatan publik memberikan peluang strategis bagi Komunitas Dieng Bersih untuk memperkuat citra positifnya di mata masyarakat dan pemerintah. Partisipasi dalam kegiatan resmi pemerintah meningkatkan legalitas sosial dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lingkungan lain di Wonosobo. Namun di sisi lain, ketergantungan pada momentum seremonial juga menimbulkan ketidakpastian dalam keberlanjutan program. Setelah kegiatan berakhir, komunitas kembali bergerak secara mandiri tanpa dukungan pendanaan atau kebijakan yang konsisten dari pihak pemerintah.

Observasi juga memperlihatkan bahwa ketika DLH menunjuk Komunitas Dieng Bersih untuk menyelenggarakan acara besar, mereka diharapkan mampu melibatkan berbagai komunitas lain dalam pelaksanaannya. Pola ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun kolaborasi yang terbuka, tetapi sekaligus menegaskan bahwa posisi Dieng Bersih tidak berada dalam hubungan istimewa dengan pemerintah daerah. Mereka lebih berperan sebagai mitra teknis yang harus berbagi ruang dan sumber daya dengan kelompok aktivis lain.

Fenomena ini mencerminkan apa yang ada pada *New Social Movement Theory* disebut sebagai “simbolisme gerakan”, bahwa keterlibatan dalam ruang publik menjadi bentuk legalitas sosial sekaligus strategi memperkuat identitas komunitas. Namun, tanpa

dukungan kelembagaan yang kuat, simbolisme tersebut berpotensi menjadi seremonial semata dan tidak menghasilkan perubahan struktural dalam sistem pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, hasil observasi memperlihatkan bahwa pola kolaborasi berbasis momentum masih menjadi salah satu tantangan utama bagi Komunitas Dieng Bersih. Meskipun memberikan keuntungan dari sisi publisitas dan jaringan sosial, bentuk kerja sama ini belum mampu menciptakan sistem kolaborasi yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku maupun kebijakan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan transformasi pola hubungan dari sekadar kemitraan berbasis acara menuju kolaborasi strategis dan kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam pandangan komunitas, keterlibatan yang bersifat temporer dan bergantung pada momentum tertentu menghadirkan dua sisi yang kontras, yakni potensi kekecewaan sekaligus ruang strategis. Kekecewaan muncul karena komunitas kerap ditempatkan sebatas mitra teknis dalam kegiatan seremonial, tanpa disertai dukungan kelembagaan yang lebih berkelanjutan, seperti alokasi pendanaan rutin, penguatan kapasitas organisasi, maupun akses pada kebijakan yang bersifat permanen. Di sisi lain, momentum tersebut juga membuka ruang peluang, sebab melalui keterlibatan itu Komunitas Dieng Bersih mampu membangun reputasi positif, memperluas jaringan kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas manajerial melalui pengalaman dalam mengelola berbagai agenda berskala besar

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pola kolaborasi yang masih bersifat insidental menyisakan kelemahan mendasar. Prinsip keberlanjutan menuntut adanya kesinambungan lintas generasi dan program yang dijalankan secara konsisten, bukan sekadar aktivitas seremonial tahunan. Apabila kemitraan hanya terbatas pada agenda momentum, maka transformasi perilaku masyarakat serta penguatan sistem pengelolaan sampah tidak akan tercapai secara optimal. Dengan demikian, tantangan eksternal komunitas lebih banyak berkaitan dengan bagaimana mengubah pola kolaborasi yang bersifat

sesaat menjadi praktik yang konsisten dan berkelanjutan, baik melalui pelaksanaan program edukasi yang berkelanjutan maupun advokasi regulasi desa yang bersifat mengikat dalam jangka panjang.

Sejalan dengan kerangka Teori Gerakan Sosial Baru, yang menekankan peran simbol, identitas kolektif, dan aksi bersama, kolaborasi berbasis momentum dapat berfungsi sebagai simbol yang memperkuat otoritas komunitas di ruang publik. Namun, tanpa disertai perencanaan kelembagaan yang berorientasi jangka panjang, simbolisme tersebut berpotensi terjebak dalam rutinitas seremonial semata. Karena itu, pola relasi antara komunitas dan pemangku kebijakan perlu bergeser dari sekedar kolaborasi berbasis acara menuju kemitraan struktural yang lebih berkesinambungan, sehingga agenda kampanye lingkungan dapat menjawab kebutuhan nyata dari keberlanjutan pembangunan.

d. Kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah

Tidak adanya dukungan pendanaan dari pemangku kebijakan, hal ini juga menjadi salah satu kendala serius. Ali menegaskan selama ini komunitas Dieng Bersih belum mendapatkan bantuan finansial dari DLH, bahkan DLH sendiri mengakui tidak memiliki anggaran untuk mendanai komunitas. Kolaborasi dengan pemangku kebijakan sifatnya hanya teknis. Sumber dana lebih banyak berasal dari kolaborasi dengan pihak swasta seperti *brand* kecantikan Wardah, atau dengan horison Resort Dieng melalui skema CSR maupun iuran anggota. Namun, tidak semua kolaborasi berjalan lancar, jourdan menyebutkan ada beberapa kerja sama yang gagal karena kurangnya *follow-up*, baik dari pihak komunitas Dieng Bersih maupun sponsor.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk mendanai aktivitas komunitas, dengan alasan menjaga semangat kemandirian gerakan lingkungan. DLH menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan pendanaan penuh untuk kegiatan aktivis lingkungan, termasuk komunitas Dieng Bersih, dengan alasan menjaga semangat kemandirian komunitas. Kepala DLH menyatakan.

“Memang kita tidak mendanai beberapa kegiatan aktivis... Karena kami melihat ini adalah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian bagian dari panggilan sosial, kalau semua kegiatan kemudian kami danai namanya bukan aktivis dong? Namanya pelaksana proyek” (Wawancara, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung mengarahkan dukungan finansial pada bentuk kerja sama tertentu yang sejalan dengan kebijakan dan prioritas program bukan dalam bentuk dukungan subsidi langsung. Akibatnya, komunitas harus mencari sumber alternatif seperti program CSR BUMN/BUMD atau bisa juga hibah pemerintah, yang mengharuskan adanya kemampuan administratif yang lebih memadai. Dengan kata lain, komunitas diharapkan tetap mandiri dalam pendanaan, sementara DLH hanya berperan sebagai fasilitator dalam bentuk regulasi dan dukungan teknis. Hal ini ditegaskan oleh Endang Lisdiyaningsih, Kepala DLH Wonosobo, yang menyatakan:

“Kalau soal pendanaan, kami memang tidak punya anggaran khusus untuk komunitas. Itu juga agar komunitas tetap mandiri, tidak hanya tergantung pemerintah. DLH lebih fokus pada regulasi dan seremonial, untuk eksekusi ya teman-teman komunitas yang bergerak” (Wawancara, 2025).

Dilihat dari sudut pandang komunitas, situasi ini dapat dikategorikan sebagai tantangan eksternal, sebab keberlangsungan aktivitas komunitas ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu membangun jejaring serta memperoleh akses terhadap sumber daya di luar dirinya. Kondisi ini menjadi kendala serius dalam menjaga keberlanjutan program. Ali Zaenal Abidin menuturkan bahwa sumber dana komunitas lebih banyak berasal dari kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR atau iuran anggota, meskipun tidak selalu berjalan lancar. Ali menjelaskan:

“Selama ini kita belum pernah dapat bantuan langsung dari DLH. Sumber dana biasanya dari swasta, misalnya Wardah, Horison, atau iuran anggota. Tapi memang tidak semua kerja sama itu berhasil, kadang dari kita kurang follow up, atau dari pihak sponsor yang tidak lanjut” (Wawancara, 2025)

Kondisi ini membuat komunitas sangat bergantung pada mitra non-pemerintah untuk keberlanjutan finansial. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong kemandirian komunitas, tetapi di sisi lain, menimbulkan kerentanan karena tidak semua kerja sama eksternal dapat terjaga secara konsisten. keterbatasan dukungan finansial pemerintah menjadi tantangan eksternal yang nyata, aktivitas kampanye lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari logistik dan peralatan untuk kegiatan *cleanup*, operasional bank sampah, hingga penyediaan ruang edukasi, ketika dukungan finansial tidak datang secara rutin dari pemerintah, maka keberlangsungan program bergantung pada kesediaan relawan, donasi sukarela, serta kemampuan menjadi kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, hal ini rawan memunculkan kondisi ketidakpastian, di mana program bisa berjalan lancar pada periode tertentu, tetapi terhambat pada periode berikutnya jika sumber dana tidak tersedia. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang tidak menyediakan pendanaan tetap juga dapat dipahami sebagai upaya mencegah ketergantungan. Kepala DLH menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menciptakan budaya yang pragmatis di kalangan aktivis.

" Kita menjaga kekuatan, artinya tadikan pemberdayaan komunitas jangan sampai ketika berkolaborasi dengan dinas LH justru akan membudayakan "*aku nek kerjasama dengan LH pasti ada anggarannya..*" ketika pemda tidak ada anggarannya berhenti deh itu teman-teman aktivis" (Wawancara, 2025).

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa tidak adanya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo, menjadi salah satu tantangan eksternal paling signifikan yang dihadapi oleh komunitas Dieng Bersih. Meskipun DLH menunjukkan dukungan dalam bentuk regulasi dan kegiatan seremonial, namun tidak ada alokasi anggaran khusus yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional komunitas.

Dalam kegiatan lapangan, peneliti mencatat bahwa berbagai inisiatif lingkungan seperti *clean-up*, bank sampah, maupun program edukasi lingkungan yang dijalankan dengan biaya mandiri, yang bersumber dari iuran anggota, kerja sama dengan pihak swasta, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satu bentuk nyata dukungan eksternal datang dari brand kecantikan Wardah dan Horison Resort Dieng, yang sesekali menyalurkan bantuan dana atau fasilitas pendukung kegiatan lingkungan. Namun, berdasarkan pengamatan dan wawancara, kerja sama semacam ini bersifat tidak tetap dan sering kali bergantung pada momentum tertentu.

Dalam kegiatan observasi di lapangan, tampak bahwa setiap kali komunitas merencanakan kegiatan berskala besar, proses penggalangan dana harus dilakukan terlebih dahulu melalui jaringan relawan atau sponsor. Sementara itu, pihak DLH menegaskan posisi mereka sebagai fasilitator regulatif, bukan penyandang dana. Kepala DLH menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memberikan pendanaan langsung bertujuan menjaga idealisme gerakan agar tidak terjebak dalam pola ketergantungan terhadap pemerintah.

Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kebijakan ini menciptakan dilema. Kemandirian yang diharapkan justru dapat menjadi beban tambahan bagi komunitas, terutama ketika mereka harus mempertahankan keberlanjutan kegiatan di tengah keterbatasan finansial. Beberapa relawan mengakui bahwa kurangnya dukungan dana menyebabkan kegiatan berjalan tidak rutin dan beberapa program berhenti sementara. Meskipun demikian, semangat solidaritas internal dan partisipasi sukarela masih menjadi kekuatan utama yang menjaga kelangsungan aktivitas komunitas.

Dengan demikian, observasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah yang menekankan kemandirian komunitas di satu sisi berhasil menjaga idealisme gerakan, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan finansial yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan kegiatan lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pola pendanaan yang tidak terstruktur menghambat

konsistensi pelaksanaan program dan mengancam keberlangsungan dampak sosial yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi baru yang memungkinkan pemerintah tetap menjaga prinsip kemandirian komunitas, tetapi disertai dengan memberi dukungan fasilitatif yang lebih terarah dan berkesinambungan, baik melalui hibah, pelatihan administrasi, maupun akses ke program CSR lintas sektor.

Hal ini sejalan dengan penelitian, Lubis & Firmansyah (2025) yang menjelaskan bahwa lemahnya dukungan kelembagaan, termasuk pada aspek pendanaan, dapat mengurangi efektivitas organisasi berbasis masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program. Demikian pula, studi Zahra & Tohani (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendanaan sering menjadi faktor penghambat utama bagi komunitas lingkungan untuk mengembangkan inovasi dan memperluas jaringan kolaborasi.

Dengan demikian, kebijakan tersebut memiliki dua konsekuensi yang saling bertolak belakang, di satu pihak berfungsi melestarikan idealisme gerakan, tetapi di pihak lain menimbulkan tekanan tambahan bagi komunitas yang dituntut untuk menimbulkan tekanan tambahan bagi komunitas yang dituntut untuk menemukan sumber pendanaan secara mandiri.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterbatasan dukungan finansial menimbulkan dilema yang signifikan. Keberlanjutan pembangunan menuntut adanya kesinambungan program dalam jangka panjang, namun pola pendanaan yang bersifat insidental membuat komunitas menghadapi kesulitan untuk menjaga konsistensi tersebut. Jika ditinjau melalui perspektif *new social movement theory*, kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan sosial seringkali harus bertahan di antara keterbatasan sumber daya material, sambil mengandalkan solidaritas serta identitas kolektif sebagai modal utama. Dengan demikian, meskipun dukungan finansial pemerintah tidak diberikan secara penuh, komunitas Dieng Bersih terdorong untuk berinovasi dan memperluas jejaring eksternal agar

tetap bertahan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

e. Tantangan Perubahan Perilaku Masyarakat

Salah satu tantangan eksternal yang paling mendasar dalam upaya kampanye lingkungan adalah faktor perilaku masyarakat. Meskipun Komunitas Dieng Bersih telah melakukan berbagai aksi nyata, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat, khususnya dalam memperlakukan sampah, masih menjadi penghambat serius bagi tercapainya perubahan yang berkelanjutan. Kepala DLH Kabupaten Wonosobo menegaskan:

“Hal yang berat ini merubah suatu hal kebiasaan yang mudah ke arah yang lebih disiplin dan tanggung jawab, karena Kabupaten Wonosobo itu kan beberapa di lewati sungai...kebiasaan yang mudah itu ya membuang sampah di sungai” (Wawancara, 2025).

Kebiasaan membuang sampah ke sungai menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung memilih cara yang instan dan praktis, meskipun dampaknya merusak ekosistem. Sungai yang seharusnya berfungsi sebagai sumber air dan penyangga kehidupan justru diperlakukan sebagai tempat pembuangan akhir. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku bukan hanya soal penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut aspek kultural yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian, Fitri (2019) yang menyebut bahwa pengelolaan sampah di desa masih sangat sederhana, masyarakat mengumpulkan sampah untuk dijual, membakar sampah, dan ada kerja bakti. Budaya hidup bersih belum menjadi bagian yang sepenuhnya melekat dalam kebiasaan sehari-hari pada masyarakat. Hal lainnya disampaikan penelitian, Kurniawati (2022) yang mendukung bahwa bentuk partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat penting agar perubahan kultural tidak hanya menjadi isyarat membentuk pola hidup yang konsisten.

Bagi Komunitas Dieng Bersih, kondisi ini menjadi tantangan eksternal karena berada di luar kendali langsung mereka. Aksi *clean-*

up sungai yang mereka lakukan memang penting sebagai simbol edukasi, namun hasilnya seringkali bersifat sementara. Setelah sungai dibersihkan, beberapa waktu kemudian sampah kembali menumpuk karena perilaku masyarakat tidak berubah secara mendasar.

Selain kebiasaan individu, tantangan eksternal juga diperparah oleh pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha lokal. Kawasan Dieng sebagai destinasi wisata nasional terus berkembang, namun perkembangan ini belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran lingkungan dari para pelaku usaha. Kepala DLH mengakui:

“kemudian perkembangan kegiatan usaha, pariwisata, bagaimana yang namanya pengembangan kegiatan usaha dia tanggung jawab dengan sampahnya, ini juga kita khusus di pemetaan, penataan lingkungan yang ada di bidang perizinan kita juga sedang melakukan edukasi kaitan pelaku usaha wisata”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali berbenturan dengan isu keberlanjutan, karena pelaku usaha cenderung berorientasi pada keuntungan tanpa menanamkan rasa tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tantangan perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan eksternal yang paling signifikan bagi komunitas Dieng Bersih. Meskipun berbagai kegiatan kampanye lingkungan telah rutin dilaksanakan, seperti aksi *clean-up*, edukasi lingkungan di sekolah, hingga kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun dampak perubahan perilaku masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang konsisten.

Di lapangan, peneliti menemukan bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah ke aliran sungai masih berlangsung, terutama di wilayah perbatasan desa yang dilewati aliran sungai. Aktivitas tersebut dilakukan bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dianggap praktis dan biasa. DLH Kabupaten Wonosobo mengonfirmasi bahwa perilaku

tersebut menjadi tantangan yang paling berat untuk diubah karena sudah menjadi pola hidup masyarakat pedesaan.

Selain faktor kebiasaan, observasi juga menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata di kawasan Dieng turut memperparah volume sampah, terutama pada musim kunjungan wisata. Pelaku usaha wisata dan penginapan belum sepenuhnya memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri, sehingga beban pengumpulan dan pemilahan banyak ditanggung oleh relawan komunitas.

Faktor budaya dan ekonomi juga memengaruhi pola perilaku masyarakat. Dalam observasi di beberapa kegiatan kampanye, masih terlihat kecenderungan masyarakat yang hanya berpartisipasi secara seremonial dimana mereka turut hadir saat kegiatan berlangsung, namun tidak melanjutkan praktik pengelolaan sampah di rumah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis belum sepenuhnya tertanam menjadi perilaku sehari-hari.

Dari sisi pemerintah daerah, observasi menunjukkan bahwa DLH telah berupaya memperkuat regulasi dan mekanisme edukasi bagi pelaku usaha wisata melalui bidang perizinan dan pengawasan lingkungan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena pengawasan lapangan tidak dapat menjangkau seluruh area wisata. Dalam konteks ini, Komunitas Dieng Bersih berperan penting sebagai aktor yang menjembatani dan menjangkau ranah non-formal yang tidak dapat dijangkau langsung oleh struktur pemerintahan.

Dengan demikian, hasil observasi memperlihatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan Dieng. Faktor kultural, kebiasaan lama, serta rendahnya kesadaran ekologis menjadi hambatan nyata, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif antara komunitas, pemerintah, dan pelaku usaha untuk membangun perilaku baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagi Komunitas Dieng Bersih, kondisi ini menghadirkan tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus mengedukasi masyarakat

umum agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Di sisi lain, mereka juga menghadapi dampak dari kegiatan pariwisata yang meningkatkan volume sampah di kawasan Dieng, sementara kapasitas mereka sebagai komunitas berbasis relawan sangat terbatas. Faktor eksternal ini semakin menegaskan bahwa keberhasilan kampanye lingkungan tidak bisa hanya dibebankan pada komunitas, melainkan harus diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang tegas dari pemerintah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, tantangan perubahan perilaku masyarakat memiliki arti penting. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga tentang perubahan perilaku sosial yang mampu menjamin keberlanjutan lintas generasi. Tanpa perubahan perilaku yang nyata, aksi-aksi lingkungan akan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan oleh DLH, misalnya melalui regulasi desa (perdes) tentang sampah atau mekanisme perizinan usaha wisata yang berbasis lingkungan, sangat dibutuhkan untuk menopang kerja-kerja komunitas di lapangan.

Kepala DLH sendiri menekankan pentingnya peran komunitas sebagai pelengkap dari peran pemerintah dalam menjangkau masyarakat. Ia menyatakan:

“Dieng Bersih sudah menjadi ikon ya, dan saya berharap itu merupakan mobilitas yang sangat bagus untuk tempat atau ruang yang tidak bisa tersentuh oleh pemerintah. Kami, desa, kelurahan, kecamatan, formal-formal begitu. Tapi kan anak-anak muda...komunitas-komunitas bisa dirangkul oleh Dieng Bersih” (Wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut merefleksikan bahwa walaupun pemerintah memiliki kewenangan formal, justru ranah non-formal lebih dipengaruhi aspek budaya yang juga dihidupkan melalui peran Komunitas seperti Dieng Bersih.

Dengan demikian, tantangan perubahan perilaku masyarakat dapat dipahami sebagai faktor eksternal yang harus dihadapi melalui

kerjasama antara pemerintah dan komunitas. Pemerintah berperan menyediakan regulasi, pengawasan, dan kebijakan berbasis lingkungan, sementara komunitas menghadirkan energi sosial untuk menyentuh kesadaran masyarakat secara langsung.

Dalam perspektif *new social movement theory*, kondisi ini menegaskan bahwa gerakan sosial lingkungan tidak hanya menghadapi struktur formal, tetapi juga berhadapan dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi hal yang krusial dan bisa ditaklukkan melalui kombinasi regulasi formal, aksi kreatif komunitas, dan keterlibatan aktif masyarakat luas.

f. Gesekan dengan Komunitas Lain

Selain menghadapi persoalan struktural seperti legalitas, pendanaan, dan perilaku masyarakat, komunitas Dieng Bersih juga dihadapkan pada tantangan eksternal berupa gesekan dengan komunitas lain. Gesekan ini muncul karena adanya perbedaan orientasi, kepentingan, maupun strategi dalam melakukan aksi lingkungan. Jourdan Abdullah, anggota aktif komunitas Dieng Bersih, menuturkan bahwa perbedaan pandangan kerap memunculkan ketegangan antar komunitas:

“Ya memang ada komunitas lain yang tidak terlalu suka dan kurang cocok, jadi kadang muncul drama komunitas karena kurang sepemahaman. Padahal kan sebenarnya sama-sama buat lingkungan” (Wawancara, 2025).

Jourdan juga menjelaskan bahwa ada perbedaan visi dengan komunitas pecinta alam lain di Wonosobo, sehingga sempat menjadi drama komunitas. Selain itu, nama “Dieng Bersih” sempat dipakai oleh dua kelompok berbeda yakni Dieng kulon dan Dieng Wetan yang memunculkan kebingungan di tingkat masyarakat hingga harus meminta pengakuan resmi dari DLH. Kondisi ini menimbulkan persoalan legitimasi, aristyan sebagai relawan aktif komunitas Dieng Bersih menjelaskan:

“sempat bingung juga karena ada yang pakai nama Dieng Bersih, padahal kita sudah duluan. Akhirnya supaya ngga berlarut, kita minta pengakuan resmi dari DLH biar jelas” (Wawancara, 2025)

Selain persoalan identitas, Aristyan menambahkan bahwa keterlibatan komunitas pecinta alam maupun pelaku wisata seringkali bersifat sporadis dan hanya muncul pada momen tertentu, bukan dalam bentuk kerja sama berkelanjutan:

“Kalau dengan komunitas lain atau pelaku wisata, kadang mereka hanya ikut kalau ada event besar. Jadi sering tarik-ulur, kurang konsisten bareng-bareng di lapangan” (Wawancara, 2025).

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa komunitas Dieng Bersih tidak hanya menghadapi tantangan teknis dan struktural, tetapi juga dinamika sosial antar komunitas yang cukup kompleks. Perbedaan ini terutama terkait orientasi kegiatan, cara pengelolaan acara, serta penentuan wilayah kerja yang sering kali tumpang tindih.

Melalui hasil wawancara dan observasi partisipatif, terlihat bahwa gesekan ini muncul karena masing-masing komunitas memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu lingkungan. Komunitas Dieng Bersih lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan kampanye publik berbasis kesadaran masyarakat, sementara komunitas lain cenderung menonjolkan aksi lapangan seperti pendakian, konservasi, atau kegiatan bersifat rekreatif. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan jarak dan kadang kesalahpahaman antar kelompok, sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota aktif Dieng Bersih yang menyebut adanya “drama komunitas” akibat kurangnya komunikasi terbuka.

Fenomena ini menggambarkan bahwa relasi antar komunitas belum sepenuhnya solid, bahkan cenderung rentan dengan perpecahan. Situasi ini sesuai dengan temuan Adiprasetyo, *et al* (2024) yang menyinggung bagaimana pembatasan ruang advokasi termasuk

pada rendahnya koordinasi antar kelompok, rawan perpecahan warga sipil memperlemah advokasi pada isu-isu lingkungan.

Dalam perspektif *New Social Movement Theory* (NSM) dalam Puspa & Manalu (2021) gesekan antar komunitas berimplikasi pada terhambatnya proses konstruksi wacana lingkungan dan kurang solidnya kesadaran kolektif. Padahal, identitas kolektif merupakan dasar yang sangat penting dalam membangun solidaritas dan memperkuat legitimasi gerakan di mata publik maupun pemangku kebijakan. Ketika terjadi konflik, kapasitas komunitas untuk membangun kebersamaan dan menghimpun dukungan eksternal ikut menurun (Alif, *et al.*, 2024).

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, gesekan ini juga menjadi tantangan serius karena menghambat terwujudnya SDGs poin 17 (*partnership for the goals*). Kolaborasi lintas sektor yang seharusnya memperkuat upaya lingkungan justru terhambat oleh adanya dominasi kepentingan masing-masing pihak, perbedaan strategi, dan perebutan identitas. Dampaknya, upaya menciptakan lingkungan bersih dan sehat di kawasan Dieng berjalan tidak optimal, karena energi komunitas lebih banyak terserap untuk mengatasi gesekan sosial dibanding memperluas kolaborasi strategis.

Dengan demikian, gesekan antar komunitas menunjukkan bahwa tantangan eksternal tidak hanya datang dari kebijakan pemerintah atau keterbatasan infrastruktur, tetapi juga dari dinamika hubungan antara aktor-aktor gerakan sosial itu sendiri. Jika tidak dikelola melalui mekanisme komunikasi terbuka, dialog rutin, dan kesepakatan kelembagaan, gesekan ini berpotensi mengurangi modal sosial yang seharusnya menjadi kekuatan utama gerakan. Bagi Komunitas Dieng Bersih, memperkuat sinergi lintas komunitas menjadi kunci penting agar gerakan lingkungan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar berkelanjutan dan partisipatif.

Tabel 4 Matriks Dalam Tantangan Internal dan Eksternal Komunitas Dieng Bersih

| Aspek Tantangan | Uraian Tantangan | Upaya |
|-----------------|--|--|
| Internal | a. Regenerasi Anggota dan Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) | a. Mengandalkan relawan aktif |
| | b. Legalitas dan Identitas Komunitas | b. Membangun legitimasi sosial dan pendekatan kelembagaan |
| | c. Keterbatasan dalam pengelolaan kerja sama | c. Menjaga relasi strategis dengan <i>stakeholder</i> |
| Eksternal | a. Faktor Geografis dan Infrastruktur | a. Optimalisasi sumber daya lokal dan relawan |
| | b. Perbedaan Orientasi dengan Pemangku Kebijakan | b. Menjaga kolaborasi dengan pemerintah serta pihak swasta |
| | c. Kolaborasi yang Bersifat Momentum | c. Membangun legitimasi sosial berbasis kepercayaan dan pengakuan masyarakat |
| | d. Kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah | d. Mengembangkan kemandirian finansial melalui donasi, dan jejaring CSR |
| | e. Tantangan Perubahan Perilaku Masyarakat | |
| | f. Gesekan dengan Komunitas Lain | |

4.1.6. Hambatan Komunitas Dieng Bersih

Dalam perjalanan gerakannya, komunitas Dieng Bersih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan teknis dan sumber daya, tetapi juga merepresentasikan interaksi sosial, relasi antar-komunitas, serta tantangan struktural dalam mengakses dukungan dari pemangku kebijakan. Hambatan-hambatan ini penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi keberlanjutan gerakan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hambatan yang dihadapi komunitas Dieng Bersih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama:

1. Pendanaan Terbatas

Komunitas Dieng Bersih sejak awal memilih untuk tidak bergantung pada dana pemerintah, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pilihan ini dilandasi oleh semangat menjaga kemandirian agar gerakan tetap otonom dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi. Ali Zaenal Abidin menegaskan:

“...sampai sekarang pun Dieng Bersih pun nggak pernah minta ke dinas... bahkan nggak pernah dikasih apa-apa sama pemerintahan. Jadi jalurnya pun yang nyariin memang dinas... kalau swasta aku wajibin buat ngasih sesuatu, kas ke Dieng Bersih minimal.” (Wawancara, 2025)

Kondisi ini diperkuat oleh pengalaman relawan, Aristyan, yang menyebut bahwa selama ini pendanaan lebih banyak berasal dari dana mandiri dan CSR swasta:

“Pendanaannya masih perorangan atau dana dari CSR. Pemerintah sama sekali belum pernah ngasih pendanaan yang berarti, paling ikut kolaborasi aja...” (Wawancara, 2025).

Tidak hanya itu, Jourdan menambahkan bahwa beberapa kerja sama dengan *stakeholder* kerap gagal karena tidak ada tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, potensi dukungan dana yang semestinya bisa dimanfaatkan akhirnya hilang begitu saja.

“Ada beberapa kolaborasi yang akhirnya gagal. Faktornya dari sana ataupun dari kita yang tidak follow up. Ada sponsor yang masuk setelah melihat kegiatan kita di media sosial... tetapi tidak ada *follow up*-nya.” (Wawancara, 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu hambatan paling krusial yang dihadapi oleh komunitas Dieng Bersih dalam menjalankan berbagai program lingkungan. Berdasarkan pengamatan langsung dan hasil wawancara mendalam, tampak bahwa sumber pendanaan komunitas masih sangat terbatas dan bersifat tidak menentu. Komunitas mengandalkan dana pribadi para anggota, donasi sukarela, serta kerja sama dengan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), namun belum memperoleh dukungan finansial langsung dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil observasi, komunitas Dieng Bersih berupaya mengatasi keterbatasan ini dengan berbagai cara kreatif, seperti menjalin kolaborasi dengan perusahaan lokal, membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta membuka ruang partisipasi publik melalui penggalangan dana mandiri. Meskipun inisiatif ini menunjukkan kemampuan beradaptasi, skalanya masih belum cukup besar untuk menunjang seluruh kebutuhan operasional.

Hambatan pendanaan ini menunjukkan kerentanan struktural komunitas lingkungan di tingkat akar rumput. Tanpa dukungan finansial yang konsisten, banyak program yang berjalan fluktuatif mengikuti momentum acara tertentu. Bukan berdasarkan perencanaan jangka panjang. Penelitian Maulana (2022) menjelaskan bahwa kurangnya bantuan pendanaan eksternal merupakan faktor utama kegagalan advokasi kebijakan, termasuk dalam pengalokasian anggaran kesehatan. Selain itu Laraswati, *et al* (2022) menunjukkan bagaimana NGO sebagai kelompok kepentingan menghadapi tantangan dalam membuat pengaruh kebijakan karena keterbatasan sumber daya, termasuk sumber pendanaan dan kapasitas kelembagaan.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, keterbatasan ini menjadi hambatan serius. Program edukasi lingkungan, penguatan bank sampah, hingga kegiatan bersih-bersih (*cleanup*) membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan alat, transportasi relawan, hingga pengelolaan pasca aksi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program berisiko hanya menjadi seremonial dan tidak berdampak jangka panjang. Selain itu, INFF (*Integrated National Financing Framework*) yang diluncurkan oleh Bappenas bekerjasama dengan UNDP (*United Nations Development Program*) menegaskan kebutuhan untuk menyelaraskan visi dan proses antar pihak, serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar pembiayaan publik dan swasta dapat diarahkan secara untuk mendukung tujuan SDGs, termasuk target pada konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pembangunan kota berkelanjutan khususnya target pada poin 11 *Sustainable cities and communities* (kota dan permukiman berkelanjutan) dan poin 12 *Responsible*

consumption and production (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab)(Bappenas.go.id, 2022).

Dalam kerangka *New Social Movement Theory* (NMS) dalam Puspa & Manalu (2021) langkah yang dipilih oleh komunitas Dieng Bersih untuk independen dari pemerintah dapat diartikan sebagai strategi mempertahankan kebebasan politik dan identitas. Komunitas Dieng bersih menolak ketergantungan pada negara agar suara kritis terhadap isu lingkungan tidak dibatasi. Namun, posisi ini membawa dampak yang signifikan berupa minimnya akses finansial serta terancamnya keberlangsungan gerakan. Disisi lain, komunitas juga harus mencari inovasi kreatif, seperti menggalang dana melalui CSR, kolaborasi dengan pihak swasta, atau kegiatan berbasis partisipasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian, kendala pendanaan menimbulkan dinamika tersendiri bagi posisi komunitas Dieng Bersih, disisi lain menjaga kemurnian idealisme, disisi lain menghadapi risiko melemahnya konsisten gerakan. Hal ini menegaskan pentingnya merancang model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai kemandirian komunitas, namun tetap memungkinkan gerakan untuk tumbuh dan berkelanjutan.

2. Keterbatasan Infrastruktur Teknis

Hambatan lain yang signifikan dalam gerakan Komunitas Dieng Bersih adalah persoalan teknis, terutama terkait pengelolaan sampah. Keterbatasan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi masalah yang terus berulang. Ali Zaenal Abidin mengungkapkan bahwa pengelolaan TPS/TPA di Wonosobo masih jauh dari standar dan justru berpotensi menjadi sumber penyakit:

“...secara infrastruktur belum memadai... TPA pun jauh untuk sampah residu... TPS yang buat desa-desa pun itu menurutku sangat membahayakan kalau pengelolaannya nggak bener. Malah jadi ladang penyakit.” (Wawancara, 2025).

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan sampah di tingkat desa belum terintegrasi dengan baik. TPS sering kali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tanpa ada mekanisme pemilahan dan daur ulang yang layak. Akibatnya, sampah menumpuk, menimbulkan

bau, dan berisiko mencemari lingkungan sekitar. Hal ini selaras dengan pengalaman Febri sebagai relawan yang menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas membuat masyarakat tetap membuang sampah sembarangan, meskipun edukasi sudah dilakukan:

“...kalau kita ngepush ngebersihin sungai tapi masyarakat enggak diedukasi ya percuma... bahkan ada rumah di bawah kali dan ada sampah yang menggunung.” (Wawancara, 2025).

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam keberlanjutan gerakan lingkungan Komunitas Dieng Bersih. Di beberapa titik wilayah Dieng dan sekitarnya, peneliti mendapati bahwa fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang layak. TPS di tingkat desa umumnya hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tanpa adanya sistem pemilahan, pengolahan, maupun daur ulang yang terintegrasi. Kondisi ini membuat volume sampah terus meningkat dan menimbulkan dampak lingkungan berupa bau tidak sedap serta potensi penyebaran penyakit.

Selama kegiatan observasi, tampak bahwa masyarakat masih kesulitan dalam menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang benar, bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena terbatasnya infrastruktur pendukung. Dalam beberapa kegiatan bersih-bersih sungai yang dilakukan komunitas, sampah kembali menumpuk setelah beberapa hari karena tidak ada sistem pembuangan akhir yang memadai. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara upaya edukasi lingkungan yang dilakukan komunitas dengan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikannya secara praktis di lapangan.

Dari pengamatan terhadap aktivitas komunitas, terlihat bahwa Komunitas Dieng Bersih berusaha mengisi kekosongan peran pemerintah dengan cara menciptakan aksi-aksi partisipatif seperti *clean-up* dan edukasi pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan fasilitas teknis membuat hasil dari aksi tersebut sering kali bersifat sementara dan tidak berdampak jangka panjang.

Dengan kata lain, keterbatasan infrastruktur teknis tidak hanya meningkatkan tantangan kerja komunitas, tetapi juga menghambat perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat yang sudah mendapat edukasi tetap akan kesulitan menerapkan perilaku ramah lingkungan bila sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak tersedia dengan baik.

Hal ini merefleksikan adanya kesenjangan antara visi pembangunan berkelanjutan dengan realitas yang ada di lapangan. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) (2021), pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan elemen utama dari pencapaian pada poin 11 *Sustainable cities and communities* (kota dan permukiman berkelanjutan) dan poin 12 *Responsible consumption and production* (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan tersebut sulit diwujudkan. Bahkan, infrastruktur yang buruk justru berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat dan mempercepat degradasi lingkungan. (Bappenas.go.id, 2022).

Dari perspektif *New Social Movement Theory* (NSM) dalam Puspa & Manalu (2021) hambatan teknis ini menegaskan bahwa gerakan lingkungan modern tidak hanya berfokus pada isu teknis “membersihkan sampah”, melainkan juga memperjuangkan perubahan struktural dalam sistem pengelolaan sampah. Gerakan yang digaungkan komunitas Dieng Bersih mengisi celah yang tidak diisi negara, yakni menghadirkan alternatif praktik lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur memperlihatkan bahwa upaya komunitas membutuhkan dukungan lintas pemangku kepentingan dan keikutsertaan pemerintah dengan kebijakan dan fasilitas, swasta dengan pendanaan dan inovasi, serta masyarakat dengan perubahan perilaku.

Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur teknis bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan hambatan struktural yang menguji konsistensi gerakan komunitas. Hambatan ini mempertegas pentingnya kolaborasi antara gerakan sosial dan kebijakan publik agar visi pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata di tingkat lokal.

3. Pola Komunikasi Antar Anggota Kurang Efektif

Selain persoalan legalitas dan identitas, tantangan internal komunitas Dieng Bersih juga terlihat dari pola komunikasi antar anggota yang belum sepenuhnya efektif. Jourdan Abdullah, salah satu informan sekaligus anggota aktif komunitas, menjelaskan bahwa pola komunikasi antar anggota terkadang kurang efektif. Safitri & Mujahid (2024) menekankan bahwa komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi tidak hanya bergantung pada kejelasan pesan yang disampaikan, tetapi juga pada adanya interaksi dua arah yang partisipatif, baik secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi vertikal menuntut adanya kejelasan instruksi dari pimpinan ke anggota, sedangkan komunikasi horizontal menuntut adanya keterbukaan dan koordinasi yang searah antar anggota agar tidak adanya kesenjangan informasi. Ketika dimensi ini tidak berjalan seimbang, potensi munculnya ego dan kesalahpahaman menjadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas kerja tim. Sejalan dengan itu, Sahid, *et al* (2024) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif diperkuat adanya konsistensi komunikasi yang terjalin secara rutin, dengan pemilihan media komunikasi yang tepat, serta kejelasan penyampaian informasi agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam konteks pada komunitas Dieng Bersih, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi hal yang penting dilakukan guna mengurangi potensi perbedaan kepentingan antar anggota, mencegah miskomunikasi, serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan kegiatan kampanye lingkungan.

Meskipun di mata publik komunitas terlihat konsisten, dalam internal sebenarnya masih sering terjadi permasalahan koordinasi dan ego antar anggota. Namun, mereka berusaha mengatasinya dengan prinsip saling mengingatkan dan saling *backup* dalam pekerjaan.

“Jadi ada kendala waktu dan pola komunikasi dari teman-teman yang dirasa cukup kurang. Meskipun orang lain lihat cukup konsisten. Padahal di dalamnya ya lumayan ada permasalahan (Wawancara, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dinamika internal, efektivitas komunikasi menjadi kunci kelancaran kerjasama. Terutama dalam pembagian tugas dan tindak lanjut program.

Hal ini divalidasi oleh penelitian Hapsari, *et al* (2018) tentang Jaringan Komunikasi dalam Partisipasi Gerakan Sosial Lingkungan menunjukkan bahwa struktur komunikasi yang belum terintegrasi dengan baik, maka hal ini dapat melemahkan efektivitas partisipasi dalam komunitas.

Lemahnya pola komunikasi internal juga menjadi tantangan bagi efektivitas gerakan. Struktur komunikasi yang kurang terintegrasi menurunkan partisipasi kebersamaan anggota. Hal ini konsisten dengan kajian Irwanto, *et al* (2025) bahwa struktur komunikasi yang kurang efektif dapat menurunkan partisipasi dan keterikatan anggota dalam gerakan pembangunan. Hambatan komunikasi internal ini berpotensi menghambat proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi internal komunitas Dieng Bersih memang menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Tampak bahwa pembagian tugas tidak selalu berjalan lancar. Pada pertemuan rutin bulanan, jumlah anggota yang hadir sering tidak penuh, sehingga informasi tidak selalu tersampaikan secara merata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi lebih sering berlangsung melalui percakapan personal atau grup pesan singkat (WhatsApp), yang meski praktis, terkadang menimbulkan miskomunikasi terkait jadwal, pembagian tugas, dan tindak lanjut program.

Namun demikian, observasi juga memperlihatkan adanya nilai solidaritas yang cukup kuat di antara anggota, seperti ketika ada anggota yang berhalangan hadir atau tidak dapat menyelesaikan tugas, anggota lain biasanya langsung mengambil alih pekerjaan tersebut tanpa memperlmasalahkan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pola komunikasi masih belum sepenuhnya efektif, semangat saling mengingatkan (*reminding*) dan saling *backup* menjadi kekuatan sosial penting yang menjaga komunitas tetap berjalan.

Dengan demikian, observasi lapangan menguatkan pernyataan informan bahwa pola komunikasi internal memang masih menjadi tantangan, namun di sisi lain juga memperlihatkan adanya kekuatan berupa solidaritas dan fleksibilitas anggota dalam menghadapi hambatan komunikasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jika struktur komunikasi bisa diperkuat, maka efektivitas kerja sama antar anggota di komunitas akan meningkat tanpa kehilangan nilai kebersamaan yang sudah menjadi ciri khas.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, lemahnya komunikasi internal dapat membatasi tingkat keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu & Evanita (2024) yang menjelaskan bahwa bentuk komunikasi personal dinilai lebih kuat dalam mendorong perubahan perilaku lingkungan dibandingkan dengan komunikasi massal. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi yang intensif, terarah, dan bersifat kedekatan emosional dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan gerakan lingkungan.

Komunitas yang tidak mampu mengelola komunikasi dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam memberdayakan secara lebih luas, sehingga orientasi bersama untuk mengubah perilaku lingkungan menjadi kurang optimal. Prinsip penyelenggaraan struktural yang baik menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan kebertanggung jawaban. Namun, apabila pola komunikasi internal tidak efektif, maka nilai-nilai tersebut tidak dapat sepenuhnya diwujudkan.

Oleh karena itu, pola komunikasi yang kurang efektif menjadi salah satu tantangan internal utama bagi Komunitas Dieng Bersih. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi koordinasi program, tetapi juga keberlanjutan partisipasi anggota, soliditas internal, dan efektivitas gerakan. Jika aspek komunikasi tidak segera diperkuat, maka kondisi ini berpotensi menjadi tantangan yang serius bagi tercapainya visi komunitas sebagai inisiator penggerak kesadaran lingkungan di kawasan Dieng.

Tabel 5 Matriks dalam Hambatan Komunitas Dieng Bersih

| Uraian Tantangan | Upaya |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan Terbatas b. Keterbatasan Infrastruktur Teknis c. Pola Komunikasi Antar Anggota Kurang Efektif | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan pendanaan mandiri melalui iuran anggota dan donasi sukarela b. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR c. Membuka partisipasi publik melalui kegiatan penggalangan dana dan dukungan masyarakat d. Menjaga kemandirian gerakan agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah |

4.1.7. Strategi Kampanye Lingkungan yang Dilakukan Dieng Bersih

Sebagai komunitas lingkungan berbasis masyarakat, komunitas Dieng Bersih menerapkan strategi kampanye yang bersifat partisipatif, edukatif, dan kultural. Strategi ini diwujudkan melalui kegiatan seperti aksi *clean-up*, program bank sampah, edukasi lingkungan di sekolah, serta kampanye pengurangan sampah plastik. Komunitas Dieng Bersih juga membangun kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, pihak swasta seperti Horison Resort, dan lembaga pendidikan dalam berbagai momentum lingkungan, seperti Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pola kampanye ini menekankan perubahan perilaku melalui keterlibatan langsung masyarakat, bukan pendekatan struktural yang bersifat *top-down*.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan strategi kampanye lingkungan yang dapat memperkuat efektivitas gerakan komunitas Dieng Bersih ke depan. Untuk itu digunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi keberlanjutan komunitas. pendekatan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam

merumuskan strategi penguatan kapasitas dan arah gerakan. melalui pendekatan ini, komunitas dapat melakukan refleksi kritis terhadap kekuatan sosial, kelemahan internal, peluang eksternal, serta ancaman yang berpotensi menghambat keberlanjutan gerakan. Dengan demikian, analisis SWOT tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, melainkan juga sebagai pijakan strategis untuk merumuskan langkah-langkah penguatan kapasitas dan arah gerakan ke depan.

Oleh sebab itu, keberadaan komunitas Dieng Bersih tidak hanya dapat dipandang sebagai gerakan sosial biasa, melainkan sebagai aktor penting dalam mengisi ruang yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh pemerintah melalui pendekatan birokratis-formal. kekuatan yang dimiliki komunitas Dieng Bersih terletak pada fleksibilitasnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang beragam, terutama anak muda, yang mungkin kurang tersentuh oleh program pemerintahan yang cenderung formal, administratif, dan seremonial.

Dieng Bersih merepresentasikan karakteristik *New Social Movement*, di mana orientasi gerakan tidak terbatas pada kepentingan ekonomi atau politik, tetapi lebih diarahkan pada penguatan identitas, kemajuan bersama, dan upaya mendorong nilai keberlanjutan. *New Social Movement* juga memfokuskan pada kreativitas, relasi sosial, dan upaya representatif yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Hal ini tampak dalam strategi komunitas Dieng Bersih yang mengedepankan pendekatan kultural dan edukatif melalui kampanye lingkungan, aksi *clean-up*, program bank sampah, hingga edukasi berbasis permainan kreatif. Komunitas Dieng Bersih tidak hadir sebagai otoritas yang mendominasi, tetapi sebagai fasilitator perubahan yang mengajak masyarakat untuk secara sukarela terlibat dalam aksi nyata.

Berdasarkan kerangka tersebut, posisi Komunitas Dieng Bersih dapat dianalisis lebih jauh melalui instrumen SWOT. Analisis ini membantu mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), sekaligus memetakan faktor eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi komunitas Dieng Bersih.

Dengan memahami empat dimensi ini, dapat dilihat secara lebih komprehensif bagaimana kapasitas komunitas terbangun, apa saja keterbatasan yang harus segera diatasi, serta ruang-ruang strategis yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis SWOT berikut tidak hanya berfungsi sebagai peta kondisi, melainkan juga sebagai dasar bagi penyusunan strategi penguatan gerakan lingkungan di kawasan Dieng:

a. *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan utama komunitas Dieng Bersih terletak pada kekuatan sosial yang terbentuk dari semangat kebersamaan dan komunitas relawan yang aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Kekuatan sosial ini tidak hanya berupa jumlah anggota yang bergabung, tetapi juga berupa kepercayaan, solidaritas, dan koneksi lintas kelompok masyarakat yang dibangun. Keberadaan anak-anak muda yang idealis dan penuh energi membuat gerakan komunitas Dieng Bersih memiliki daya tarik sendiri di tengah masyarakat. Kekuatan sosial yang dimiliki komunitas Dieng Bersih, terutama melalui semangat kebersamaan dan komunitas relawan yang aktif, memiliki relevansi yang erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Wahyono, *et al* (2025), menunjukkan bahwa pengelolaan berkelanjutan di kawasan Dieng, khususnya pada ekosistem danau vulkanik, sangat bergantung pada modal sosial, kepercayaan, dan jejaring lintas aktor yang terbentuk antara pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kebijakan lainnya.

Hal ini sejalan dengan karakteristik gerakan Dieng Bersih yang bertumpu pada solidaritas dan partisipasi aktif anak-anak muda sebagai aktor penggerak. Dengan kata lain, keberadaan jejaring relawan muda bukan hanya memperkuat pengakuan sosial komunitas, tetapi juga berpotensi menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola lingkungan kolaboratif di Dieng. Korelasi ini menegaskan bahwa inisiatif komunitas tidak bisa dipandang sebagai gerakan sporadis, melainkan sebagai komponen penting dari strategi keberlanjutan kawasan melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, komunitas relawan yang aktif mendukung tidak hanya terbatas pada kalangan pemuda lokal, tetapi juga melibatkan mahasiswa, pelajar, hingga komunitas hobi seperti pecinta alam, pesepeda, dan komunitas lari. Keterlibatan berbagai latar belakang tersebut memperluas jangkauan kampanye dan membuat gerakan ini lebih mudah diterima di ruang-ruang sosial yang beragam. Hal ini memperlihatkan bahwa komunitas Dieng Bersih mengedepankan strategi partisipatif dan menyeluruh, di mana semua lapisan masyarakat diposisikan sebagai subjek yang turut bergerak, bukan sekedar menonton.

Selaras dengan penelitian Annisa & Bua (2019), bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi lingkungan, khususnya melalui penerapan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*), berperan penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Temuan tersebut selaras dengan pola gerakan Komunitas Dieng Bersih yang tidak hanya bertumpu pada pemuda lokal, tetapi juga melibatkan mahasiswa, pelajar, serta komunitas hobi seperti pecinta alam, pesepeda, dan komunitas lari dalam berbagai kegiatan kampanye lingkungan. Keterlibatan lintas kalangan ini memperluas jangkauan gerakan sekaligus membentuk ruang sosial yang lebih inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat diposisikan sebagai subjek yang aktif bergerak, bukan sekedar penonton. Dengan demikian, terlihat bahwa strategi partisipatif berbasis keberagaman aktor menjadi kunci penting dalam memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan gerakan lingkungan.

Kekuatan berikutnya dapat dilihat dari kapasitas komunitas dalam menginisiasi program yang variatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program rutin seperti *clean up* sungai dan kawasan wisata tidak sekedar bersifat simbolik, tetapi juga menjadi sarana edukasi langsung tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Inisiatif bank sampah membuka peluang partisipasi aktif sekaligus memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat yang ingin mengelola sampah rumah tangga secara lebih produktif. Sementara itu, program edukasi kreatif melalui permainan, keterampilan, atau kegiatan seni

memberikan daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak dan pelajar, sehingga nilai-nilai lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini.

Dari sisi komunikasi, Komunitas Dieng Bersih memiliki keunggulan dalam menggunakan pendekatan yang persuasif dan fleksibel. Alih-alih menggunakan gaya kampanye yang kaku atau *top-down*, komunitas ini lebih mengedepankan komunikasi personal, interaktif, dan menyenangkan. Strategi ini memungkinkan pesan-pesan lingkungan dapat diterima tanpa kesan menggurui, sekaligus memupuk kesadaran bersama secara lebih alami. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter gerakan sosial baru yang menekankan kreativitas, interaksi sosial, dan pembentukan kesadaran bersama sebagai modal utama perubahan perilaku.

Secara keseluruhan, kekuatan Komunitas Dieng Bersih mencakup empat aspek penting seperti kekuatan sosial, komunitas relawan yang aktif dan beragam, program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta strategi komunikasi yang adaptif. Keempat aspek ini bukan hanya menjadikan komunitas sebagai ikon kampanye lingkungan di kawasan Dieng, tetapi juga menguatkan posisinya sebagai aktor penggerak dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan yang selaras antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan utama Komunitas Dieng Bersih terletak pada keterbatasan kapasitas internal yang masih menjadi hambatan dalam menjaga konsistensi gerakan. Persoalan pertama adalah regenerasi anggota yang relatif lambat. Sebagai komunitas berbasis relawan, keberlanjutan program sangat bergantung pada partisipasi generasi muda. Namun, realitas sosial di wilayah non-perkotaan seperti Wonosobo menunjukkan bahwa minat anak muda untuk bergabung dalam kegiatan non-profit masih rendah, sebab orientasi mereka lebih banyak diarahkan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Akibatnya, regenerasi berjalan lambat dan menimbulkan ketergantungan pada sejumlah kecil individu inti.

Temuan penelitian Azmi & Wijaya (2024), mengenai partisipasi pemuda di Temanggung memperlihatkan bahwa meskipun keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan organisasi relatif tinggi, partisipasi mereka dalam memberikan opini serta terlibat lebih jauh dalam pembangunan masih tergolong rendah, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini selaras dengan kelemahan yang dihadapi komunitas Dieng Bersih, yakni regenerasi anggota yang berjalan lambat dan ketergantungan pada segelintir individu inti. Sebagai komunitas berbasis relawan, keberlanjutan gerakan Komunitas Dieng Bersih sangat ditentukan oleh partisipasi generasi muda, namun realitas sosial di wilayah non-perkotaan seperti Wonosobo menunjukkan bahwa orientasi anak muda lebih banyak diarahkan pada aktivitas yang berorientasi ekonomi daripada keterlibatan non-profit. Korelasi ini menegaskan bahwa rendahnya minat pemuda untuk aktif dalam kegiatan sukarela lingkungan bukan hanya persoalan internal komunitas, tetapi juga cerminan dari dinamika struktural di wilayah pedesaan yang masih terbatas pada generasi muda.

Kelemahan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah anggota inti yang relatif sedikit membuat beban kerja tidak seimbang, sehingga kegiatan sering bersifat sporadis dan tidak selalu berkesinambungan. Ketika beberapa anggota inti sibuk dengan pekerjaan atau urusan pribadi, program komunitas cenderung terhenti sementara. Hal ini menunjukkan lemahnya pembentukan struktur gerakan yang terlalu bergantung pada individu tertentu.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Komunitas Dieng Bersih, di mana jumlah anggota inti relatif sedikit sehingga beban kerja tidak seimbang dan kegiatan berjalan sporadis, memperlihatkan lemahnya struktur kelembagaan yang masih bergantung pada individu tertentu. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam studi Famiola *et al* (2024) yang menegaskan bahwa tanpa penguatan kapasitas internal berupa manajemen, kepemimpinan, dan sistem kelembagaan yang lebih formal, sebuah gerakan rentan terhenti ketika individu inti sibuk atau berhalangan. Dengan demikian, kelemahan dalam aspek SDM yang dialami Dieng Bersih menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan

gerakan agar aktivitas dapat berlangsung berkesinambungan dan tidak bergantung pada keberadaan beberapa orang saja, melainkan pada sistem yang mampu menopang keberlanjutan organisasi secara menyeluruh.

Selanjutnya, legalitas komunitas yang belum jelas juga menjadi kerentanan yang signifikan. Ketidakjelasan status hukum membuat komunitas Dieng Bersih sulit mengakses sumber pendanaan formal dari pemerintah maupun mitra pendukung. Ketiadaan otoritas formal juga menempatkan komunitas pada kapasitas negosiasi terbatas di hadapan birokrasi, sehingga advokasi kebijakan atau permohonan dukungan seringkali terhambat.

Legalitas komunitas yang belum jelas merupakan salah satu kerentanan signifikan yang dihadapi Komunitas Dieng Bersih, karena ketiadaan status hukum membuat komunitas sulit mengakses pendanaan formal dan memiliki keterbatasan dalam kapasitas negosiasi dengan birokrasi. Kondisi ini selaras dengan temuan Triono, *et al* (2024), yang menunjukkan bahwa legalisasi organisasi komunitas penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan. Namun, mereka juga menekankan bahwa ketidakjelasan status hukum justru menimbulkan masalah seperti konflik internal, kepemimpinan ganda, serta lemahnya verifikasi data organisasi. Dengan demikian, persoalan legalitas yang dialami komunitas Dieng Bersih tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses sumber daya, tetapi juga pada kredibilitas dan kapasitas negosiasi yang rendah pada komunitas dalam advokasi maupun kerja sama lintas-aktor.

Selanjutnya, terdapat kelemahan pada pengelolaan kerja sama dengan pihak luar. Meskipun komunitas telah membangun kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, maupun sektor swasta, pola kerja sama yang terbentuk cenderung bersifat insidental, hanya muncul pada momen tertentu seperti peringatan hari besar lingkungan. Kurangnya sistem pengelolaan kerja sama jangka panjang membuat sinergi yang dibangun sulit untuk dipertahankan secara konsisten.

Kelemahan pada pengelolaan kerja sama dengan pihak luar yang dialami Komunitas Dieng Bersih, di mana kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, maupun sektor swasta cenderung bersifat insidental dan hanya muncul pada momen tertentu, sejalan dengan temuan Sumiyana, *et al* (2022), penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan yang integratif dan inovatif mampu memperkuat kemitraan antara NGO dan pemerintah daerah, keberlanjutan program kolaboratif sering kali terhambat karena ketergantungan pada individu pemimpin dan lemahnya proses pembentukan kelembagaan. Dengan demikian, pola kerja sama insidental yang ada pada Komunitas Dieng Bersih mencerminkan tantangan yang sama, yaitu minimnya sistem formal dan mekanisme jangka panjang yang dapat menjaga konsistensi kolaborasi lintas-aktor di luar momentum seremonial.

Secara menyeluruh, kelemahan internal ini memperlihatkan bahwa Komunitas Dieng Bersih masih menghadapi persoalan mendasar terkait keberlanjutan gerakan. Minimnya SDM, belum adanya legalitas formal, pola komunikasi yang belum optimal, serta keterbatasan manajemen kolaborasi menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan agar komunitas tidak hanya bergantung pada semangat sesaat, tetapi mampu tumbuh sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan.

c. *Opportunities* (Peluang)

Komunitas Dieng Bersih memiliki sejumlah peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat strategi kampanye lingkungannya. Pertama, terdapat momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Wacama global tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang krisis iklim memberikan ruang yang lebih besar bagi komunitas untuk mengarusutamakan isu lingkungan. Hal ini menjadi kesempatan untuk memperluas cakupan audiens kampanye, baik di tingkat lokal, nasional, maupun melalui jejaring komunitas lain.

Hal ini sejalan dengan penelitian, Tiyas, *et al* (2024) yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memberdayakan

ekonomi lokal, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs terutama di bidang produksi dan konsumsi berkelanjutan. Dengan kata lain, pengalaman serupa dapat dijadikan rujukan bagi Komunitas Dieng Bersih untuk mengaitkan kampanye lingkungan dengan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga isu lingkungan tidak hanya menjadi wacana global, tetapi juga relevan dengan keseharian warga.

Peluang berikutnya berasal dari kolaborasi dengan lembaga sekolah, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal. Dunia pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keberlanjutan sejak dini. Keterlibatan pelajar dan mahasiswa melalui kegiatan edukasi lingkungan, program ekstrakurikuler, hingga penelitian kolaboratif, menjadi dukungan sosial baru yang dapat memperluas basis relawan dan penggerak. Dukungan dari sekolah juga memungkinkan pesan-pesan lingkungan lebih cepat tertanam dalam kebiasaan masyarakat.

Kolaborasi dengan dunia pendidikan menjadi peluang penting yang dapat dimaksimalkan Komunitas Dieng Bersih dalam memperkuat gerakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari, *et al* (2022) yang menunjukkan bagaimana Program Adiwiyata mampu mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah sekaligus melibatkan komunitas sekolah dalam berbagai aktivitas berwawasan hijau. konsep tersebut menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi ruang belajar formal, tetapi juga wadah strategis untuk menanamkan nilai keberlanjutan sejak dini. Dengan keterlibatan pelajar dan mahasiswa melalui edukasi lingkungan, program ekstrakurikuler, maupun penelitian kolaboratif, Komunitas Dieng Bersih dapat memperluas jaringan relawan muda yang aktif. Lebih jauh, dukungan institusi pendidikan memungkinkan pesan-pesan lingkungan lebih masif membudaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga gerakan komunitas tidak sekedar berbasis kampanye, melainkan juga tertanam dan melekat dalam praktik sosial sehari-hari.

Selain itu, dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan peluang besar untuk memperkuat keberlanjutan program. CSR dari sektor pariwisata, perbankan, hingga

perusahaan lokal dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan seperti pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah, pembiayaan kegiatan edukasi, atau dukungan logistik untuk aksi kolektif. Apabila dimanfaatkan secara optimal, CSR dapat menjadi solusi alternatif terhadap keterbatasan pendanaan dari pemerintah daerah.

Dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Komunitas Dieng Bersih untuk memperkuat keberlanjutan programnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurwulan (2022), yang menunjukkan bagaimana program CSR tidak hanya fokus pada bantuan material, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah, konservasi air, dan penguatan *community engagement*. Konsep seperti ini menunjukkan bahwa CSR mampu memberikan dampak ganda yakni memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan mengadopsi pola serupa, CSR dari sektor pariwisata, perbankan, maupun perusahaan lokal di Wonosobo dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan nyata Komunitas Dieng Bersih, seperti pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah, pembiayaan kegiatan edukasi, hingga dukungan logistik untuk tindakan bersama. Apabila dimanfaatkan secara optimal, kemitraan CSR ini dapat menjadi solusi alternatif atas keterbatasan pendanaan pemerintah daerah dan memastikan program komunitas berjalan lebih konsisten serta berkelanjutan.

Peluang lain adalah mengembangkan media sosial dan teknologi komunikasi yang memungkinkan kampanye lingkungan menjangkau *audience* yang lebih luas. Dengan penggunaan platform digital, pesan-pesan kampanye dapat disampaikan melalui konten kreatif seperti video, infografis, maupun *storytelling* visual. Tren digitalisasi ini sejalan dengan minat anak muda, sehingga komunitas berkesempatan memperkuat *branding* serta menarik relawan baru secara lebih efektif.

Pemanfaatan media sosial dan teknologi komunikasi digital menjadi peluang penting bagi Komunitas Dieng Bersih dalam memperluas jangkauan kampanye. Hal ini sejalan dengan penelitian Alif & Astuty (2024),

mengenai akun instagram @zerowaste.id yang berhasil menggunakan konten kreatif seperti tips zero waste, infografis, challenge, hingga fakta tentang e-waste untuk mendidik publik mengenai isu lingkungan. Strategi tersebut membuktikan bahwa platform digital mampu menghadirkan pesan lingkungan secara menarik dan mudah diakses, terutama oleh generasi muda yang akrab dengan dunia digital. Dengan mengadaptasi pola serupa, Komunitas Dieng Bersih dapat memperkuat branding melalui video, storytelling visual, maupun konten infografis yang informatif, sehingga bukan hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas serta menarik relawan baru secara lebih efektif.

Selanjutnya, tren wisata ramah lingkungan yang semakin populer juga membuka peluang integrasi program kampanye dengan sektor pariwisata. Kawasan Dieng yang dikenal sebagai destinasi wisata alam dan budaya dapat dijadikan ruang implementasi pariwisata berkelanjutan. Melalui program edukasi wisata hijau, aksi *clean up* kawasan wisata, atau penyediaan fasilitas bank sampah di area wisata, komunitas dapat menggabungkan gerakan lingkungan dengan pengalaman wisata. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan kampanye, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Tren wisata ramah lingkungan membuka peluang strategis bagi Komunitas Dieng Bersih untuk mengintegrasikan kampanye lingkungan dengan sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan temuan Fabian & Abdullah (2024), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lanskap alam untuk ekowisata berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat ekonomi dari pariwisata. Dengan meniru pola tersebut, Komunitas Dieng Bersih dapat mengembangkan program edukasi wisata hijau, aksi *clean-up* kawasan wisata, serta penyediaan fasilitas bank sampah di area wisata. Pendekatan ini memungkinkan kampanye lingkungan tidak hanya menjangkau *audiens* lebih luas, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat,

sehingga keberlanjutan gerakan dan partisipasi komunitas dapat diperkuat secara serentak.

Secara keseluruhan, peluang-peluang ini menunjukkan bahwa gerakan Komunitas Dieng Bersih memiliki ruang strategis untuk tumbuh lebih besar, baik melalui dukungan kebijakan, kolaborasi pendidikan, sektor swasta, maupun penggabungan dengan tren wisata berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, komunitas dapat memperkuat posisi sebagai aktor penting dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

d. *Threats* (Ancaman)

Selain kekuatan dan peluang yang dimiliki, Komunitas Dieng Bersih juga menghadapi berbagai ancaman eksternal yang cukup kompleks. Ancaman pertama berkaitan dengan faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur di kawasan Dieng dan Wonosobo. Letak geografis yang berada di dataran tinggi dengan kontur perbukitan membuat distribusi sampah dan penyediaan sarana pengelolaan lingkungan menjadi sulit. Kondisi ini diperparah dengan minimnya Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang layak. Infrastruktur yang belum memadai ini berpotensi menciptakan permasalahan baru, seperti penumpukan sampah, pencemaran sungai, dan risiko kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian Khafsoh (2021), yang mengidentifikasi sejumlah masalah utama seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, minimnya dukungan dari pemerintah desa, tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta ketiadaan pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Kondisi geografis dataran tinggi dengan kontur perbukitan semakin memperumit distribusi sampah dan penyediaan sarana pengelolaan lingkungan. Akibat minimnya Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan TPA yang layak, risiko penumpukan sampah, pencemaran sungai, serta dampak kesehatan masyarakat menjadi lebih besar. Temuan ini menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama yang perlu

diatasi agar program kampanye lingkungan Komunitas Dieng Bersih dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ancaman kedua muncul dari perbedaan orientasi dengan pemangku kebijakan. Pemerintah daerah cenderung menekankan pendekatan regulatif dan administratif, sedangkan Komunitas Dieng Bersih lebih mengutamakan aksi langsung dan edukasi partisipatif. Perbedaan orientasi ini menimbulkan kesenjangan dalam penyusunan strategi bersama, sehingga upaya advokasi dan sinergi program tidak selalu berjalan optimal.

Ketiga, kolaborasi yang bersifat momentum juga menjadi tantangan. Dukungan dari pihak eksternal, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, seringkali hanya hadir pada momen tertentu, seperti peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau event lingkungan lainnya. Pola kolaborasi yang tidak berkelanjutan ini membuat program cenderung bersifat seremonial, bukan sistematis dan berjangka panjang.

Hal ini selaras dengan temuan dari (kemenlh.go.id, 2025), menekankan bahwa meskipun sarana seperti CCTV dan jaring penahan telah dipasang, tanpa kesadaran kolektif dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, inisiatif tersebut hanya akan bersifat seremonial semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kolaborasi yang sistematis dan berjangka panjang, program lingkungan cenderung tidak efektif dan sulit mencapai dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi, integrasi strategi, dan pembentukan komitmen jangka panjang menjadi kunci agar setiap kolaborasi dapat memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan gerakan lingkungan.

Ancaman berikutnya adalah kebijakan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas. Anggaran lingkungan seringkali tidak menjadi prioritas utama, sehingga komunitas harus mengandalkan swadaya atau dukungan dari CSR. Keterbatasan dana ini menjadi hambatan serius dalam memastikan keberlanjutan program, khususnya program yang membutuhkan fasilitas teknis dan logistik.

Selain itu, tantangan perubahan perilaku masyarakat masih menjadi hambatan besar. Meskipun sudah dilakukan kampanye berulang kali, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Perubahan

perilaku membutuhkan proses panjang dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi sosial masih menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kampanye lingkungan.

Ancaman lainnya adalah gesekan dengan komunitas lain. Perbedaan visi, pendekatan, maupun orientasi kegiatan terkadang menimbulkan konflik horizontal antar-komunitas. Gesekan ini dapat mengurangi solidaritas gerakan lingkungan di tingkat lokal serta melemahkan kekuatan kolektif dalam advokasi isu lingkungan.

Terakhir, ancaman yang tidak kalah penting adalah hambatan pendanaan terbatas, konflik yang menghalangi kolaborasi, serta keterbatasan infrastruktur teknis. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperburuk situasi eksternal yang dihadapi. Keterbatasan dana membatasi kapasitas gerakan, konflik internal maupun eksternal menghambat sinergi, sementara infrastruktur yang tidak memadai menutup peluang pengelolaan sampah secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, ancaman-ancaman ini menegaskan bahwa gerakan Komunitas Dieng Bersih tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga persoalan struktural dan kultural. Untuk bertahan, komunitas perlu merumuskan strategi adaptif yang mampu menjawab tantangan geografis, regulatif, finansial, maupun sosial budaya yang mengitari gerakan mereka.

Tabel 6 SWOT Komunitas Dieng Bersih

| | S (<i>Strength</i>) kekuatan | W (<i>Weaknesses</i>) kelemahan |
|--|--|---|
| | a. Kekuatan sosial dengan dukungan relawan muda dan jaringan lintas daerah b. Kapasitas menginisiasi program variatif (<i>clean-up</i> , bank sampah, edukasi) c. Citra positif sebagai ikon kampanye lingkungan di kawasan Dieng | a. Regenerasi lambat dan keterbatasan SDM inti b. Legalitas komunitas belum jelas sehingga akses dukungan terbatas c. Pola komunikasi internal kurang efektif d. Pengelolaan kerja sama masih insidental, belum berkelanjutan. |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>d. Kedekatan dengan masyarakat lokal sehingga pesan kampanye mudah diterima</p> <p>e. Fleksibilitas pendekatan komunikasi yang menyesuaikan <i>audiens</i>.</p> | |
| <p>O (<i>Opportunity</i>) peluang</p> <p>a. Meningkatnya kesadaran publik tentang isu lingkungan dan SDGs.</p> <p>b. Kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal</p> <p>c. Dukungan CSR sektor swasta untuk pendanaan kegiatan.</p> <p>d. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana <i>branding</i> dan rekrutmen relawan.</p> <p>e. Tren wisata ramah lingkungan yang dapat diintegrasikan dengan kampanye.</p> | <p>Strategi SO (<i>Strength-Opportunities</i>)</p> <p>a. Memanfaatkan jejaring relawan dan citra sebagai ikon lingkungan untuk memperluas kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.</p> <p>b. Mengintegrasikan program variatif (<i>clean-up</i>, bank sampah, edukasi) dengan tren wisata ramah lingkungan untuk memperkuat dampak ekologis sekaligus ekonomi.</p> <p>c. Menggunakan media sosial untuk memperluas <i>branding</i>, edukasi digital, dan rekrutmen relawan baru.</p> | <p>Strategi WO (<i>Weaknesses-Opportunities</i>)</p> <p>a. Mengatasi regenerasi dan keterbatasan SDM dengan menjalin kemitraan dengan sekolah dan perguruan tinggi sebagai sumber relawan berkelanjutan.</p> <p>b. memperkuat akses pendanaan melalui kolaborasi CSR sebagai solusi atas belum jelasnya legalitas komunitas</p> <p>c. meningkatkan efektivitas komunikasi internal dengan memanfaatkan teknologi digital, sejalan dengan peluang perkembangan media sosial.</p> <p>d. Membentuk forum lingkungan lintas komunitas untuk membangun pola kerja sama jangka panjang.</p> |
| <p>T (<i>Threats</i>) ancaman</p> <p>a. Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur TPS/TPA</p> <p>b. Perbedaan orientasi dengan pemangku kebijakan</p> <p>c. Kolaborasi eksternal yang bersifat momentum, tidak berkelanjutan.</p> <p>d. Kebijakan pendanaan daerah terbatas.</p> | <p>Strategi ST (<i>Strength-Threats</i>)</p> <p>a. Menggunakan pendekatan persuasif dan fleksibel untuk menjembatani pendekatan orientasi dengan pemangku kebijakan</p> <p>b. menjadikan aksi nyata (<i>clean-up</i>, bank sampah, edukasi langsung)</p> <p>c. mengoptimalkan dukungan jejaring</p> | <p>Strategi WT (<i>Weaknesses-Threats</i>)</p> <p>a. mengurangi ketergantungan pada SDM inti dengan membagi peran lebih merata dan memperkuat administrasi internal</p> <p>b. mengembangkan unit usaha daur ulang atau koperasi berbasis bank sampah sebagai solusi pendanaan mandiri.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| e. Tantangan perubahan perilaku masyarakat f. Gesekan dengan komunitas lain | relawan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur formal melalui inovasi lokal, misalnya pengolahan sampah organik. | c. Memperkuat legitimasi kelembagaan melalui legalisasi formal untuk menghindari hambatan dukungan pemerintah d. Mengelola potensi gesekan dengan komunitas lain melalui komunikasi terbuka dan penekanan pada tujuan bersama, yakni pelestarian lingkungan. |
|--|--|---|

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat dipahami bahwa komunitas Dieng Bersih menempati posisi strategis sebagai faktor penggerak kampanye lingkungan di kawasan Dieng. Kekuatan utama komunitas ini terletak pada dukungan sosial, jejaring relawan muda, serta strategi komunikasi kreatif yang persuasif dan inklusif, sehingga mampu menjangkau masyarakat lintas usia dan latar belakang. Kekuatan tersebut diperkuat oleh peluang eksternal berupa meningkatnya kepedulian publik terhadap isu lingkungan, dukungan pemerintah daerah, potensi pariwisata berkelanjutan, serta akses kolaborasi dari CSR maupun kementerian. Namun demikian, komunitas Dieng Bersih masih dihadapkan pada kelemahan internal berupa terhambatnya permasalahan regenerasi anggota, struktur organisasi yang belum baku, serta belum memiliki legalitas formal yang dapat membatasi akses pendanaan. Di sisi lain, ancaman eksternal seperti budaya membuang sampah yang masih mengakar, pertumbuhan pada sektor pariwisata yang tidak ramah lingkungan, minimnya dukungan finansial dari pemerintah, hingga potensi *burnout* atau rasa bosan pada relawan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara serius.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis pada bagaimana pengelolaan sampah, tetapi juga ditopang oleh kekuatan sosial, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor. Komunitas Dieng Bersih, melalui perannya sebagai aktor perubahan, telah merepresentasikan ciri khas *New Social Movement* (NSM), yaitu gerakan yang berorientasi pada pembentukan identitas kolektif, penguatan kesadaran kritis, serta kampanye berbasis kreativitas dan jaringan sosial. Hal ini membedakan gerakan mereka dari pendekatan birokratis pemerintah yang lebih formal dan administratif.

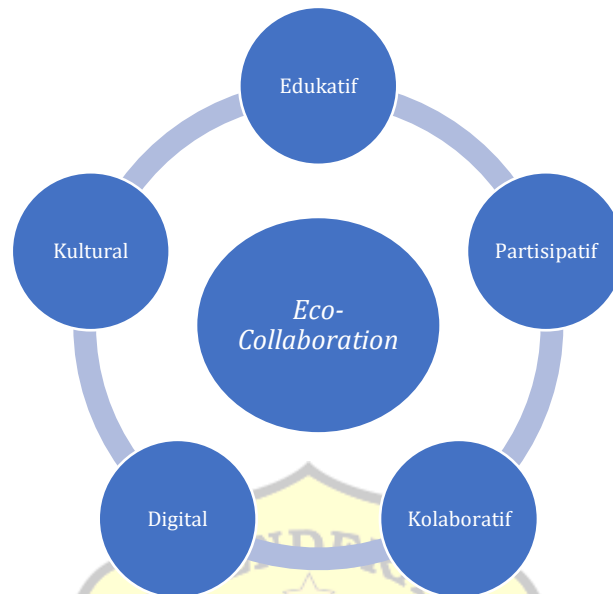
Dengan memadukan fleksibilitas aksi komunitas dan peluang kolaborasi kebijakan, Dieng Bersih berpotensi menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Meskipun demikian, hasil analisis SWOT juga menegaskan bahwa posisi Komunitas Dieng Bersih masih rentan jika kelemahan internal dan ancaman eksternal tidak segera diatasi. Upaya penguatan kelembagaan melalui legalitas formal, regenerasi yang sistematis, dan pembentukan model kemandirian finansial seperti koperasi sampah atau unit usaha sosial, menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan daya tahan komunitas Dieng Bersih. Di sisi lain, penguatan strategi komunikasi dan jejaring kolaborasi perlu terus dilakukan untuk menghadapi tantangan perubahan perilaku masyarakat serta dampak negatif pariwisata. Dengan demikian, analisis SWOT ini tidak hanya menggambarkan kondisi objektif komunitas, tetapi juga memberikan arah strategis agar Komunitas Dieng Bersih mampu berkembang dari gerakan relawan sporadis menjadi aktor penting yang konsisten berkontribusi pada keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi di kawasan Dieng.

Penelitian ini merumuskan strategi *Eco-collaboration* sebagai rumusan konseptual antara analisis SWOT dan berdasarkan data lapangan. konsep *Eco-collaboration* atau kolaborasi ekologis dirumuskan dalam penelitian ini sebagai model yang komprehensif yang menggabungkan berbagai pendekatan kampanye lingkungan dengan lima elemen pendukung seperti edukatif, partisipatif, kolaboratif, digital dan kultural ke dalam satu kerangka strategis yang berorientasi pada keberlanjutan. Secara konseptual, *Eco-collaboration* berangkat dari gagasan bahwa keberhasilan kampanye lingkungan tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga adanya keterhubungan antara aktor sosial, nilai budaya, dan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya ekologis bersama (Ramirez & Vezzoni, 2021).

Dalam penerapannya, *Eco-collaboration* berfungsi sebagai strategi kolaboratif yang menghubungkan lima elemen pokok dalam kampanye lingkungan ke dalam satu sistem yang bersifat saling melengkapi dan memperkuat. Pemilihan konsep *Eco-collaboration* dalam penelitian ini berlandaskan pada kebutuhan untuk memahami kampanye lingkungan sebagai sistem sosial yang bersifat dinamis, partisipatif, dan terhubung lintas sektor dan aktor. Pendekatan ini digunakan karena kampanye lingkungan tidak hanya dipandang sebagai serangkaian kegiatan edukatif atau aksi simbolik, melainkan sebagai proses komunikasi dan kolaborasi yang melibatkan semua

dimensi seperti pengetahuan, nilai, teknologi dan budaya secara bersamaan (Arief, *et al.*, 2022).



Gambar 5. Gambar Eco-Collaboration
Sumber: Peneliti (2025)

Penggunaan pendekatan *Eco-collaboration* dalam konteks komunitas Dieng Bersih berorientasi pada temuan lapangan yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kampanye tidak hanya ditentukan dari seberapa kuat pesan lingkungan disampaikan namun, sejauh mana komunitas mampu menjalin kerja sama ekologis dengan berbagai pihak. Mulai dari masyarakat, pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, hingga komunitas lainnya. Dengan demikian, *Eco-collaboration* dipilih karena mampu merepresentasikan realitas gerakan lingkungan yang bersifat integratif, adaptif, dan kontekstual, sekaligus memberikan kerangka analisis yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat di Dieng yang menjunjung tinggi nilai gotong royong.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah faktor strategis yang memengaruhi efektivitas kampanye lingkungan yang dijalankan komunitas Dieng Bersih. Penelitian ini merumuskan strategi penguatan kampanye lingkungan yang bersifat aplikatif dan kontekstual, sesuai dengan permasalahan serta potensi yang dimiliki komunitas Dieng Bersih, kelima strategi inilah yang kemudian menjadi landasan utama dalam sistem kampanye lingkungan komunitas Dieng Bersih yang berorientasi pada perubahan perilaku ekologis masyarakat secara berkelanjutan. Adapun strategi kampanye yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Edukatif

Strategi pertama yang dijalankan ialah strategi edukatif, yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan pelestarian alam. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas Dieng Bersih berupaya menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada ranah formal, tetapi juga diperluas ke kelompok masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kepada pedagang, pengelola *homestay*, hingga komunitas wisata lokal.

Dalam pelaksanaannya, strategi edukatif yang diterapkan bersifat dialogis dan aplikatif, sesuai dengan konsep komunikasi lingkungan yang dikemukakan Cox dalam (Hawley, *et al.*, 2023), dalam praktiknya, proses penyadaran yang dilakukan komunitas Dieng Bersih tidak berjalan secara satu arah, tetapi diwujudkan melalui interaksi dan keterlibatan langsung antara komunikator dan masyarakat, sehingga pesan lingkungan dapat dipahami melalui adanya aksi nyata. Pendekatan ini mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam berbagai kegiatan lapangan seperti pemilahan dan daur ulang sampah, serta pemeliharaan kebersihan daerah sekitar.

Dengan demikian, bentuk edukasi yang dikembangkan oleh komunitas Dieng Bersih merepresentasikan *transformative learning*, karena menekankan perubahan perilaku ekologis melalui keterlibatan langsung, refleksi kritis, dan pemaknaan pengalaman sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Karena *transformative learning* mengacu pada proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada transformasi cara pandang individu melalui refleksi terhadap pengalaman yang dialami (Singer-Brodowski, 2023). Dalam konteks ini, proses edukasi yang dilakukan komunitas Dieng Bersih tidak sekedar menyampaikan informasi lingkungan, melainkan membangun kesadaran ekologis yang mendorong perubahan sikap dan tindakan nyata di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, strategi edukatif yang bersifat interaktif dan aplikatif ini memperkuat temuan penelitian oleh Utami & Martha (2020), yang meneliti efektivitas kampanye “Bogor tanpa kantong plastik”, menemukan bahwa efektivitas kampanye lingkungan meningkat ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses edukasi dan aksi nyata. Namun, pada konteks komunitas Dieng Bersih, ditemukan pendekatan baru yakni sinergi antara edukasi lingkungan dan kearifan lokal masyarakat dataran tinggi Dieng, misalnya dalam pengelolaan limbah pertanian dan keterlibatan pelaku wisata lokal. Hal ini menunjukkan adanya penggabungan berupa bentuk edukasi lingkungan yang menggabungkan pendekatan ekologis dengan nilai-nilai budaya lokal sesuatu yang belum banyak diuraikan dalam penelitian kampanye lingkungan sebelumnya.

b. Partisipatif

Strategi kedua yang dirumuskan ialah strategi partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap bentuk aksi lingkungan yang dijalankan oleh komunitas Dieng Bersih. Strategi ini berorientasi pada pandangan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terjadi ketika masyarakat menjadi subjek, bukan hanya sekedar objek, dari adanya proses perubahan tersebut. Kampanye yang dilakukan tidak hanya dikerjakan oleh pengurus inti komunitas saja, melainkan melibatkan relawan, pelajar atau mahasiswa, masyarakat serta pemangku kebijakan. Bentuk konkret dari strategi ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang secara konsisten dilaksanakan oleh komunitas Dieng Bersih, seperti *clean-up*, penerapan program bank sampah juga menjadi sarana partisipatif bagi masyarakat untuk menukar sampah anorganik dengan insentif ekonomi sederhana. Dilakukannya kampanye “Dieng Tanpa Plastik” juga menjadi upaya persuasif yang ditujukan kepada pedagang dan pengelola *homestay* untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Melalui berbagai bentuk keterlibatan tersebut, komunitas Dieng Bersih berupaya menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kebersamaan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Secara teoritis, strategi partisipatif yang dijalankan komunitas Dieng Bersih sejalan dengan konsep komunikasi partisipatif dalam pembangunan

yang dikemukakan oleh Servaes & Freire dalam (Turmudi, 2019), Freire menegaskan bahwa kesadaran reflektif terhadap realitas sosial terbentuk melalui partisipasi aktif dan dialog antarwarga. Hal ini juga relevan dengan pandangan Cox dalam (Zainuddin & Trihandayani, 2024) dalam teori komunikasi lingkungan, bahwa keberhasilan kampanye ekologis sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam praktik nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, strategi partisipatif pada komunitas Dieng Bersih bukan hanya sarana untuk mobilisasi massa, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran sosial yang mampu menanamkan nilai keberlanjutan ke dalam praktik hidup masyarakat.

Temuan ini diperkuat dari hasil penelitian oleh Musadad, *et al* (2022), yang menyoroti partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Studi tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata seperti pengelolaan objek wisata, konservasi lingkungan, hingga kegiatan ekonomi berbasis alam dapat memperkuat kesadaran ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, strategi partisipatif yang dirumuskan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai inti dari keberhasilan kampanye lingkungan komunitas Dieng Bersih. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebatas kehadiran dalam kegiatan, tetapi sebagai proses bersama membangun kesadaran, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Melalui ajakan terbuka, kegiatan bersama seperti *clean-up*, pengelolaan bank sampah, serta edukasi lingkungan, komunitas Dieng Bersih mampu menciptakan ruang dialog dan kolaborasi yang mendorong perubahan perilaku ekologis masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, strategi partisipatif ini tidak hanya memperkuat teori komunikasi partisipatif dan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan model keterlibatan sosial yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Kolaboratif

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan temuan lapangan, peneliti merumuskan strategi kolaborasi bagi komunitas Dieng Bersih sebagai langkah

penguatan kemitraan sosial dan dukungan kelembagaan dalam menjalankan kampanye lingkungan yang berkelanjutan. Strategi ini didasari oleh pemahaman bahwa keberhasilan gerakan lingkungan tidak dapat dicapai secara mandiri, melainkan melalui sinergi lintas aktor mencakup pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif, komunitas Dieng Bersih diharapkan mampu membangun hubungan kemitraan yang bersifat saling menguntungkan dan berorientasi pada kepentingan ekologis bersama.

Adapun implementasinya, dapat diwujudkan melalui kegiatan kolaboratif seperti aksi *clean-up* lintas komunitas, program edukasi bersama sekolah dan perguruan tinggi, pelatihan pengelolaan sampah terpadu yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta pengembangan inisiatif wisata berkelanjutan yang menggabungkan nilai konservasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan perumusan strategi ini, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama teknis, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem pendukung sosial yang memperkuat posisi komunitas dalam jaringan gerakan lingkungan di tingkat lokal.

Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperluas jangkauan kampanye, tetapi juga memberikan penguatan sosial dan politik bagi komunitas untuk diakui sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan gagasan Servaes dan Melkote & Steeves dalam (Dwiana, *et al.*, 2025) yang menekankan pentingnya *multi-stakeholder collaboration* dalam mendorong perubahan sosial. Kolaborasi antara komunitas lokal, pemangku kebijakan, dan sektor swasta menciptakan bentuk komunikasi yang dialogis dan saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan penguatan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pandangan Castells dalam (Shumate & Cooper, 2021) turut menjelaskan bahwa dalam era jaringan (*network society*), keberhasilan gerakan sosial, termasuk kampanye lingkungan, sangat bergantung pada kemampuan membangun jaringan kolaboratif yang dinamis dan adaptis.

Berdasarkan data lapangan, penelitian Cahyaningsing (2024) memperkuat bahwa keberhasilan kampanye lingkungan sangat ditentukan oleh

kemampuan komunitas dalam membangun kerja sama multi pihak, baik dengan pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta. Melalui kolaborasi, gerakan lingkungan dapat berpindah dari aktivitas simbolik menuju gerakan sosial yang memiliki dampak yang sistematis.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, peneliti merumuskan strategi kolaboratif bagi komunitas Dieng Bersih sebagai panduan praktis untuk memperkuat jejaring multi aktor dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Strategi ini menegaskan peran komunitas tidak hanya sebagai pelaksana aksi lingkungan, tetapi juga sebagai penghubung yang menjembatani masyarakat, pemangku kebijakan, lembaga pendidikan dan sektor ekonomi lokal. Strategi ini menggabungkan aspek lingkungan, pendidikan, dan pariwisata secara sinergis, sekaligus menciptakan ruang kolaboratif untuk pertukaran pengetahuan, pembelajaran sosial dan penguatan kapasitas komunitas. Dengan demikian, rumusan strategi kolaboratif ini tidak hanya memperkuat teori komunikasi dan kolaborasi multi aktor, tetapi juga memberikan panduan aplikatif bagi komunitas Dieng Bersih untuk memobilisasi sumber daya, memperluas partisipasi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah Dieng.

d. Digital

Dalam upaya memperkuat efektivitas kampanye lingkungan, penelitian ini merumuskan strategi digital sebagai salah satu elemen penting bagi komunitas Dieng Bersih. Strategi dirancang untuk memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai sarana komunikasi publik yang mampu menjangkau *audiens*, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok kritis dalam pembentukan kesadaran lingkungan. Melalui platform digital, komunitas Dieng Bersih dapat secara konsisten membagikan dokumentasi kegiatan, video edukatif, serta pesan ajakan untuk berpartisipasi dalam aksi lingkungan, sehingga tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Konten visual yang menarik, narasi *storytelling*, serta penggunaan tagar dirancang untuk memperkuat *branding* komunitas, membangun citra positif, serta menciptakan identitas yang melekat pada misi lingkungan.

Pendekatan ini juga menekankan adanya keterlibatan timbal balik dan partisipasi digital, dimana *audiens* tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat merespons, berdiskusi, maupun membagikan konten, sehingga tercipta jaringan sosial virtual yang memberkuat jejaring relawan dan pengikut kampanye. Strategi digital ini sejalan dengan prinsip komunikasi partisipatif Servaes dalam (Dwiana, *et al.*, 2025), yang menekankan pada pentingnya keterlibatan publik dalam penyebaran informasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media sosial untuk kampanye lingkungan diperkuat oleh penelitian Satyavira & Kartika (2024), yang juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi visual dan kolaboratif dalam kampanye lingkungan di media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial secara kreatif dan kolaboratif dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan.

Dengan demikian, strategi digital yang dirumuskan tidak hanya memperluas jangkauan *audiens*, tetapi juga memperkuat keterlibatan nyata masyarakat, membangun identitas komunitas, serta menciptakan efek sinergis antara komunikasi daring dan aksi secara langsung. Strategi ini menegaskan bahwa adaptasi komunitas terhadap era digital bukan sekedar soal tingkat perhatian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong perubahan perilaku dan partisipasi aktif bagi pembangunan berkelanjutan khususnya di kawasan Dieng.

e. Kultural

Strategi lainnya guna meningkatkan efektivitas kampanye lingkungan, penelitian ini merumuskan strategi kultural sebagai salah satu elemen penting bagi komunitas Dieng Bersih. Strategi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran lingkungan melalui pemanfaatan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya masyarakat Dieng, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki relevansi sosial dan emosional. Pelaksanaan strategi kultural mencakup penggunaan bahasa daerah, simbol-simbol budaya, serta praktik tradisi lokal sebagai sarana komunikasi lingkungan. kegiatan kampanye sering dikaitkan dengan agenda budaya, seperti pada gelaran acara Dieng Culture Festival atau upacara adat, sehingga

penyampaian pesan lingkungan berlangsung dalam konteks budaya yang familiar dan sarat makna historis bagi masyarakat sekitar.

Pendekatan ini memungkinkan kampanye lingkungan membangun keterikatan emosional dengan masyarakat lokal, mendorong penerimaan dan partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan secara *top-down* atau formal. Strategi ini sejalan dengan prinsip cultural sustainability dalam literatur pembangunan berkelanjutan yang di kemukakan oleh Throsby dalam (Jarvela, 2023), yang menekankan pentingnya penyelarasan nilai-nilai budaya dalam upaya perlindungan lingkungan agar lebih diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, strategi kolaboratif yang diterapkan komunitas Dieng Bersih memperkuat kolaborasi antar aktor dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan inovasi berupa *eco-collaboration* yakni kolaborasi ekologis yang menyatukan aktor-aktor terkait secara terpadu yang menyatukan aspek lingkungan, pendidikan dan pariwisata. Model ini menunjukkan bahwa komunitas lingkungan dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pemangku kebijakan, dan sektor ekonomi lokal, serta menjadi penggerak bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan.

